

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konsep

2.1.1. Sekilas Aksi Kekerasan Oleh Kelompok Islam Dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Fakta-fakta sejarah Indonesia menjelaskan bahwa paham dan aksi radikalisme tumbuh dan berkembang dengan berbagai intensitas dan keragamannya sesuai dengan perkembangan jaman.

2.1.1.1. Kekerasan Kelompok Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda

Pada masa Hindia Belanda, terutama sejak terjadinya eksploitasi ekonomi secara besar-besaran melalui *cultuurstelsel*, radikalisasi petani di pedesaan pun semakin marak. Masuknya kapitalis-kapitalis Barat, baik pemerintah maupun swasta ke daerah pedesaan atau wilayah pedalaman, tidak saja sekedar menghadirkan perusahaan-perusahaan besar saja, melainkan juga budayanya. Dampaknya, bukan saja kesejahteraan masyarakat dalam arti ekonomis yang terkena imbas, melainkan juga secara budaya. Banyak institusi desa yang hancur atau setengah hancur. Juga berbagai tradisi desa yang semula menjadi tumpuan masyarakat tersisihkan. Oleh karena itulah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat petani menjadi lebih terasa. (Iskandar; n.d.)

Sartono Kartodirdjo mengelompokkan gerakan pemberontakan itu dalam empat kelompok, sesuai dengan isu-isu serta penyebab yang menjadi pendorong terjadinya pemberontakan tersebut. Keempat kelompok atau kategori itu ialah: (1) gerakan antipemerasan, (2) gerakan mesianistis, (3) gerakan revivalisme dan sektarian, dan (4) gerakan Sarekat Islam (SI) lokal (Kartodirdjo; 1978: 29). Dari keempat kategori itu, hampir semua gerakan menggunakan ide-ide keagamaan, seperti ide perang suci atau sabilillah, termasuk penggunaan tarekat, dalam masa perekrutmen pesertanya, maupun selama pemberontakan itu terjadi. Misalnya dalam pemberontakan petani di tanah partikelir Ciomas tahun 1886, yang dikategorikan sebagai gerakan antipemerasan, pihak tuan tanah menuduh

fanatisme keagamaan (Islam) sebagai bensinnya (Kartodirdjo; 1978: 29). Demikian pula dalam pemberontakan Achmad Ngisa yang terjadi pada tahun 1871, yang mengaku dirinya sebagai Ratu Adil atau Erucakra, yang dikategorikan sebagai gerakan mesianistis, juga dipergunakan ide perang suci dan penggunaan tarekat (Kartodirdjo; 1978: 77). Barangkali yang agak berbeda sifatnya adalah gerakan revival dan sektarian, yang peristiwanya tidak hanya melakukan perlawanan terhadap dominasi kolonial, melainkan juga melawan terhadap tradisi agama yang dominan.

Salah satu contoh gerakan sektarian yang melawan tradisi agama yang dominan adalah Perang Padri. Perang ini awalnya adalah akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang ini terjadi pada kawasan Kerajaan Pagaruyung antara tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini dimulai dengan munculnya gerakan Kaum Padri (Kaum Ulama) dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang ada dalam kawasan Kerajaan Pagaruyung sekitarnya, seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (*opium*), minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam. Kemudian gejala ini memicu perpecahan antara Kaum Padri dengan Kaum Adat dibawah pimpinan Raja Pagaruyung waktu itu Sultan Muning Alamsyah dan kemudian meluas dengan melibatkan Belanda.

Gerakan Padri berawal dari perkenalam Haji miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif dengan Wahabi saat menunaikan ibadah haji pada awal abad ke-19, ketika itu Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi. Sekembalinya ke Nusantara ketiga haji tersebut berusaha melakukan pemurnian Islam sebagaimana dilakukan Wahabi. Gerakan yang mereka lakukan ini sama dengan Wahabi yaitu memvonis tarekat Syattariyah, dan Tasawuf pada umumnya, yang telah ada di Minangkabau beberapa abad sebelumnya sebagai kesesatan yang tidak bisa ditoleransi, karena didalamnya banyak mempraktekkan takhayul, bid'ah, dan khurafat yang harus diluruskan, kalau perlu diperangi. (Abdurrahman Wahid; 2009: 93)

Mengutip Abdul A'la⁴, Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa:

... Beberapa kekerasan yang dilakukan Padri, selain mengikuti kegemaran Wahabi memusyrikkan, mengkafirkan, dan memurtadkan siapapun yang berbeda, mereka juga menerapkan hukum yang sama sekali asing dalam diktum hukum Islam, seperti kewajiban memelihara jenggot dan didenda 2 suku (setara dengan 1 gulden) bagi yang mencukurnya; larangan memotong gigi dengan ancaman denda seekor kerbau bagi pelanggarnya; denda 2 suku bagi laki-laki yang lututnya terbuka; denda 3 suku bagi perempuan yang tidak menutup sekujur tubuhnya kecuali mata dan tangan; denda 5 suku bagi yang meninggalkan shalat fardlu untuk pertama kali, dan hukum mati untuk berikutnya. (Abdurrahman Wahid; 2009: 93)

Selain kekerasan-kekerasan tersebut para Padri juga melegalkan perbudakan. Tuanku Imam Bonjol, tokoh Padri terkemuka dan dikenal sebagai pahlawan nasional mempunyai tujuh puluh orang budak laki-laki dan perempuan, budak-budak ini sebagian merupakan hasil rampasan perang yang mereka lancarkan kepada sesama muslim karena dianggap kafir. Tidak itu saja, kekerasan Padri yang dilakukan terhadap sesama Muslim Minangkabau antara lain penyerangan terhadap istana Pagaruyung pada tahun 1809. Pembantaian massal dilakukan terhadap para anggota keluarga dan pembantu raja yang dekat dengan istana. Pada tahun 1815 dilakukan lagi serangan terhadap kerajaan ini yang membunuh hampir seluruh keluarga kerajaan yang telah memeluk Islam sejak abad ke-16 itu. Tuanku Nan Renceh, salah satu tokoh Padri, juga menghukum mati bibinya sendiri yang telah tua dan tidak membolehkan jasadnya dikubur tetapi dibuang ke hutan, hanya karena mengunyah sirih yang diharamkan Wahabi. Lebih jauh Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Padri ini sama belaka dengan yang dilakukan oleh Wahabi pada masa formasinya dan oleh pengikutnya seperti halnya al-Qaeda dan Taliban dewasa ini. (Abdurrahman Wahid; 2009: 94)

⁴ Abdul A'la, "Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2008 (tidak dipublikasikan).

Pemahaman dan aksi kaum ulama pada saat itu, dalam pandangan penguasa adat merupakan sebuah aksi radikal yang mencoba untuk melakukan perubahan sosial secara cepat dan menyeluruh. Bentuk perlawanan langsung kaum ulama berupa konflik senjata dipilih dalam kondisi dimana distribusi kekuatan antara kelompok ulama dan kelompok adat bisa dikatakan relatif seimbang. Selain itu, pola konflik vertikal antara masyarakat dengan penguasa bergeser menjadi konflik horizontal setelah kekuatan kelompok ulama menyebar ke wilayah adat yang lain. Bahkan dengan keikut-sertaan Belanda dalam konflik menjadikan situasi saat itu pada kondisi konflik yang lebih kompleks. Dalam perjalanannya, radikalisme selalu mencari bentuk perlawanan yang cocok secara situasional.

2.1.1.2. Kekerasan Kelompok Islam Pada Masa Orde Lama

Radikalisme pada masa orde lama diwarnai oleh aksi separatisme yang bertujuan untuk mendirikan negara yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi-aksi radikal pada masa orde lama terjadi karena tidak semua pihak dapat terakomodasi kepentingannya dalam terbentuknya Negara Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka dimana semua pihak dan elemen merasa memiliki andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah fundamental suatu negara seperti bentuk negara dan ideologi nya.

Gerakan DI/TII Kartosuwiryo, Gerakan radikal yang menamakan diri Darul Islam (DI) dengan sayap militernya Tentara Islam Indonesia (TII) pada tahun 1948 melakukan perlawanan bersenjata untuk menumbangkan pemerintah RI dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berdasarkan Syariat Islam. (Pikiran Rakyat, 18 September 2004)

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo menjadi titik tolak dalam menganalisa gerakan terorisme bermotivasi agama di Indonesia. DI/TII muncul lima tahun sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dibentuk untuk mewujudkan ide Kartosuwiryo dalam rangka menegakkan syariat Islam secara formal dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Ide demikian masih melekat

sebagai tujuan utama dalam benak para pelaku terorisme saat ini. Oleh karena itu, walaupun DI/TII Kartosuwiryo tidak termasuk dalam kriteria organisasi teroris, namun dalam isu-isu radikalisme, keberadaan kelompoknya tetap diberikan sorotan. (Pikiran Rakyat, 18 September 2004)

Gerakan DI/TII Kahar Muzakar, merupakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo yang memimpin gerakan di daerah Sulawesi Selatan. Kahar menerima tawaran Kartosuwiryo untuk menjabat Panglima Divisi IV TII wilayah Sulawesi. Divisi tersebut kemudian diberi nama Divisi Hasanuddin. Kahar Muzakar tidak mau menggunakan nama TII untuk pasukannya, ia lebih memilih untuk menggunakan nama Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi dan wilayah-wilayah Indonesia Timur lainnya bersedia bergabung dengan NII. Kahar Muzakar merupakan Wakil Pertama Menteri Pertahanan NII. (Pikiran Rakyat, 18 September 2004)

Selama kepemimpinan Kahar Muzakar di DI Sulawesi, tercatat beberapa kali telah melakukan aksi, seperti penyerangan terhadap TNI, perusakan jembatan, penculikan terhadap dokter dan para pendeta Kristen. Pemerintah Indonesia melancarkan Operasi Tumpas dan Operasi Kilat untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar. Pada tanggal 2 Februari 1965, Kahar Muzakar tewas tertembak dalam operasi penyerangan yang dilancarkan oleh TNI (Chaidar, 1999:159).

Gerakan DI/TII Aceh Daud Beureuh, meletus pada tahun 1953. Daud Beureuh menjadi tokoh utama yang sangat berpengaruh di DI/TII wilayah Aceh. Daud Beureuh menyatakan bahwa Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh adalah bagian dari NII. DI/TII pimpinan Daud Beureuh berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah Aceh, hanya kota-kota besar seperti Banda Aceh (Kutaraja), Sigli, Langsa dan Meulaboh yang tetap berada di dalam penguasaan RI. (Pikiran Rakyat, 18 September 2004)

Gerakan NII Aceh dilatarbelakangi oleh perasaan kecewa Daud Beureuh terhadap pemerintahan Soekarno. Kekecewaan itu muncul karena Soekarno tidak menepati janjinya untuk menerapkan syariat Islam di wilayah Aceh setelah perang kemerdekaan usai. Gerakan pemberontakan di Aceh diselesaikan, karena pada

tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberikan status daerah istimewa dan otonomi luas, terutama di bidang agama, adat dan pendidikan. (Pikiran Rakyat, 18 September 2004)

2.1.1.3. Kekerasan Kelompok Islam Pada Masa Orde Baru

Dalam perjalanan sejarah Indonesia juga tercatat adanya beberapa gerakan radikal yang secara terbuka melakukan pemberontakan bersenjata dan tindakan-tindakan kekerasan serta taktik terorisme yang bertujuan memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan bercita-cita membentuk suatu pemerintah/negara sendiri. Sedikit berbeda dengan pada masa Orde Lama, tertumpasnya PKI dan ditetapkannya komunis sebagai ideologi yang terlarang, muncul gerakan-gerakan radikal yang berlatar belakang ideologi keagamaan Islam.

Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an muncul beberapa **kelompok Islam garis keras** yang selain ingin menegakkan Syariat Islam, juga menyatakan “perang” terhadap komunisme di Indonesia. Pemerintah Orde Baru bertindak tegas dan melarang kelompok-kelompok garis keras tersebut. Dalam era Orde Baru gerakan Islam radikal ekstrim kanan (EKA) dan ekstrim komunis kiri (EKI) ditindak represif, dinyatakan sebagai ancaman dan tidak mendapat akomodasi. Di lain pihak, gerakan Islam moderat berhasil mendapat akomodasi yang kondusif sebagai gerakan yang menopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural untuk memecahkan masalah pluralisme di Indonesia. Beberapa gerakan kelompok Islam radikal pada masa Orde Baru, antara lain;

Komando Jihad, merupakan kelompok ekstrimis Islam Indonesia yang ada dari tahun 1968 sampai dibubarkan melalui aksi pembersihan oleh anggota intelijen pada pertengahan tahun 1980-an. Kelompok Komando Jihad yang terkenal adalah Kelompok Warman dan Kelompok Imran. Beberapa aksi radikalisme dan terorisme yang dilakukan kelompok ini, antara lain; (Saifullah; 2009)

- 1) Peledakan bom Masjid Nurul Iman, Padang pada tanggal 11 November 1976. Pelakunya adalah Timzar Zubil, tokoh yang disebut pemerintah sebagai Komando Jihad. Tapi, Timzar tidak pernah ditemukan sampai sekarang.

2) Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 28 Maret 1981, lima anggota Komando Jihad Imran naik ke pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang sedang melakukan penerbangan domestik di Indonesia dan menyandera 57 penumpang yang sedang dalam penerbangan ke Don Muang, Bangkok setelah pengisian bahan bakar di Malaysia. Dengan bersenjata senapan mesin dan dinamit, mereka menuntut: pembebasan 20 tahanan politik; supaya semua “pejabat Yahudi dan kaum militer Israel” segera diusir dari Indonesia; dan bahwa mereka diberikan 1,5 juta dolar. Setelah empat hari, pasukan komando Indonesia menyerbu pesawat tersebut, menewaskan empat dari lima pembajak, dan menangkap yang kelima. Pilot pesawat, Herman Rante dan Achmad Kirang, seorang anggota pasukan komando Indonesia meninggal dalam serbuan tersebut. Namun semua penumpang dan awak lainnya selamat.

Kelompok Komando Jihad Warman, Pada penghujung 1970-an dan awal 1980-an terjadi sejumlah aksi terorisme yang lazimnya dikaitkan dengan suatu kelompok yang dikenal sebagai Komando Jihad pimpinan Warman. Kelompok ini bertujuan membentuk “Dewan Revolusi Islam Indonesia.” Mereka menentang Pancasila dan UUD 1945. Dalam jangka panjang, kelompok ini berkeinginan membentuk negara Islam Indonesia, sementara tujuan jangka pendeknya adalah meng-hancurkan komunisme. (Saifullah; 2009)

Pada Januari 1979, Komando Jihad pimpinan Warman untuk pertama kalinya memulai aksi dengan membunuh Rektor Universitas Sebelas Maret, Solo. Menurut dokumen pengadilan, korban dibunuh lantaran membeberkan eksistensi Jamaah Islamiyah kepada otoritas pemerintah dan, karena itu, bertanggung jawab atas penangkapan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Pembunuhan dilakukan oleh Warman, Hasan Bauw, Abdullah Umar, dan Farid Ghozali. (Saifullah; 2009)

Warman juga dilaporkan merencanakan pembunuhan hakim dan jaksa yang menangani kasus Haji Ismail Pranoto. Pada 15 Januari 1979, Farid Ghozali ditembak mati oleh petugas karena berupaya melarikan diri ketika hendak ditangkap. Dua hari ke-mudian, Hasan Bauw ditembak mati oleh Warman dan

kelompoknya atas tuduhan membocorkan persembunyian Ghozali. Setelah itu, ada dua upaya perampokan yang dipimpin Warman dan melibatkan Abdullah Umar. Pada 1 Maret 1979, suatu tim yang dipimpin Warman berhasil merampok mobil yang membawa gaji pegawai IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Upaya kedua adalah perampokan di IKIP Malang yang gagal. Aksi perampokan ini dipijakkan kelompok Warman pada konsep fa'i, yakni pengumpulan dana perjuangan lewat penyerangan terhadap musuh-musuh Islam. Pada penghujung 1980, Komando Jihad Warman dihancurkan oleh petugas keamanan. Warman sendiri tertembak pada 23 Juli 1981 di Soreang, Jawa Barat. (Saifullah; 2009)

Kelompok Komando Jihad Imran, Merupakan kelompok fundamentalis Islam yang pernah dilatih terror dan pembuatan bom di Libia dan Iran, pernah memimpin Kelompok Tujuh di Saudi Arabia. Kelompok Imron melakukan aksi penyerangan pada pos-pos polisi di Jakarta, Cimahi, Bandung, Mojokerto, Cawang dan Malang. Kelompok sempalan Islam yang mirip dengan Komando Jihad Warman adalah jamaah yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein. Kelompok Imran terbentuk ketika sang Imam, yakni Imran sendiri, memba'i'at 190 anggotanya pada Juni 1980 di Cimahi, Jawa Barat. Lantaran aktivitas Jamaah Imran dipandang berbahaya, petugas keamanan menyerang markasnya di Masjid Istiqamah pada Agustus 1980. Dalam penyerangan tersebut, 44 anggota Jamaah Imran ditangkap. Imran sendiri berhasil melarikan diri, dan bersama pehgikutnya membalas serangan aparat dengan menyerbu Kantor Polisi Cicendo, Bandung, pada 11 Maret 1981. Dalam aksi balasan ini, sejumlah senjata berhasil dilarikan dan empat petugas dibunuh. (Saifullah; 2009)

Dua minggu kemudian, lima anggota Jamaah Imran membajak pesawat Garuda DC-9 Woyla dan memaksa pilotnya terbang serta mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Pasukan Komando Indonesia kemudian menyerbu pesawat itu dan berhasil membunuh empat dari lima pembajaknya. Pembajak kelima akhirnya mati secara misterius ketika dibawa pulang ke Jakarta. Imran sendiri tertangkap pada 7 April 1981 di Jakarta. Ia disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada penghujung 1981 dan akhirnya dinyatakan bersalah serta dijatuhkan hukuman mati berdasarkan undang-undang subversi (UU no. II/PNPS/1963). Pada penghujung Mei 1983, Imran menjalani eksekusi.

Kelompok Amir Biki, Merupakan kelompok fundamentalis Islam yang memiliki anggota tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta, Pondok Ungu Bekasi, Tangerang, Rangkasbitung, dan Banten. Kelompok ini merupakan dalang kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984 yang melakukan penyerangan Markas Polres Jakarta Utara. (TEMPO Interaktif; Kamis, 17 Juni 2004)

Gerakan Pemuda Ka'bah, Merupakan Organisasi Massa di bawah binaan Partai Persatuan Pembangunan, meskipun secara organisasi bukan tergolong islam radikal, akan tetapi beberapa anggota organisasi ini beberapa kali melakukan aksi-aksi radikalisme, antara lain; (TEMPO Interaktif; 13 September 2000)

- 1) Pada tanggal 4 Oktober 1984 melakukan aksi Peledakan bom di BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta Barat. Pelakunya adalah Muhammad Jayadi, anggota Gerakan Pemuda Ka'bah (anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan) karena protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Jayadi yang tidak dikenal sebagai anggota Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah mengaku menjadi pelaku peledakan.
- 2) Pada tanggal 4 Oktober 1984 melakukan aksi Peledakan di BCA dan Kompleks Pertokoan Glodok, Jakarta. Pelaku Chairul Yunus alias Melta Halim, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin yang juga merupakan anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ka'bah.
- 3) Pada tanggal 4 Oktober 1984 aksi Peledakan juga terjadi di BCA Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pelaku Edi Ramli yang juga anggota Gerakan Pemuda Ka'bah. Siapa dalang pemboman, sebenarnya masih misterius, tapi Edi dijatuhi hukuman penjara. Rentetan kasus peledakan beberapa kantor BCA itu menyeret tokoh-tokoh Petisi 50, seperti H.M. Sanusi, A.M. Fatwa, dan H.R. Dharsono.

Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN), Pada tanggal 15 April 1999 meledakkan bom di Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pelakunya adalah Ikhwan, Naiman, Edi Taufik, Suhendi, dan Edi Rohadi, anggota kelompok yang

disebut-sebut sebagai Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN) pimpinan Eddy Ranto. Motif pemboman adalah kriminal (perampokan). Kelompok AMIN ini juga dituduh meledakkan Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, akan tetapi dalam kasus ini, motifnya diputuskan sebagai kriminal. Bahan peledak ramuan KClO₃ (kalium klorat) dan TNT. (TEMPO Interaktif; 13 September 2000)

2.1.1.4. Kekerasan Kelompok Islam Pada masa Reformasi

Ketika Orde Baru tumbang dan digantikan dengan Orde Reformasi yang dikenal sebagai Era Kebangkitan Demokrasi, paradigma demokratisasi telah memungkinkan menjamurnya gerakan Islam garis keras, militan, radikal dan fundamental. Selain itu, beberapa aktivis radikal Islam yang pada masa pemerintahan Orde Baru melarikan diri ke luar negeri mulai kembali pulang ke tanah air karena secara politik mereka bukan lagi merupakan ancaman bagi kepentingan politik tertentu di Indonesia.

Selain menjamurnya gerakan Islam garis keras, militant, fundamental dan radikal, Era Reformasi juga melahirkan gerakan kelompok-kelompok radikal berlatar belakang etnis, kepentingan politik, hobi atau kegemaran, bahkan berlatar belakang kepentingan universal seperti hak-hak asasi, demokratisasi, kebebasan pers dan lingkungan.

Beberapa Gerakan kelompok radikal Islam yang menonjol pada masa Reformasi, antara lain; Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah (FKAWJ) dengan Laskar Jihadnya, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), merupakan sebagian dari gerakan radikal nasional yang berjuang menuntut penerapan syariat Islam melalui amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945, dengan mencantumkan kembali tujuh patah kata dalam rumusan Piagam Jakarta, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah (FKAWJ) dan Laskar Jihad, Organisasi ini dibentuk di Solo pada 14 Februari 1998, beberapa bulan menjelang lengsernya rezim Soeharto, dan dipimpin oleh **Ja'far Umar Thalib**. Karakter utama forum ini adalah salafisme, yang menganjurkan pembacaan literal terhadap Al-Quran dan hadits, serta menolak seluruh penafsiran

independen maupun praktek-praktek tradisional. FKAWJ memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah Indonesia, lulusan perguruan tinggi dan yang putus kuliah. (Gatra; 2000)

FKAWJ memiliki sayap paramiliter bernama **Laskar Jihad** yang dipimpin oleh Thalib sendiri. Popularitas Laskar Jihad melebihi FKAWJ lantaran mendapat publikasi yang luas dari media massa. Aksi Laskar Jihad antara lain pengiriman pejuangnya ke Maluku, sambil membuat suatu website yang menampilkan galeri foto kekejian Kristen di Maluku, laporan harian tentang kerusuhan Maluku dan tafsiran bilingual (Indonesia-Inggris) tentang mana Jihad. (Gatra; 2000)

Laskar Jihad dibentuk pada Februari 2000, memang muncul dilatarbelakangi oleh pecahnya perang saudara antara kaum muslimin dan Kristen di Maluku pada awal 1999. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum muslimin dari kelompok paramiliter Kristen yang tidak mampu dilakukan pemerintah, dan menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid dari kekuasaannya karena menolak menerapkan syariat, mengusulkan pencabutan larangan Partai Komunis, serta mewacanakan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. (Gatra; 2000)

Operasi Laskar Jihad memperlihatkan eksese-eksesnya, pada Maret 2001, seorang anggota laskar jihad dipersalahkan telah melakukan zina dan dihukum oleh Thalib dengan rajam. Thalib ditangkap polisi atas tuduhan memprovokasi kerusuhan dan membunuh. Thalib dilepaskan dari penjara, tetapi tuntutan terhadapnya tidak dicabut. Pada awal 2002, karena menentang Deklarasi Malino sebagai momentum perdamaian Kristen-Muslim di Maluku, polisi kembali menangkap Thalib pada Mei 2002, tapi kasusnya lambat diselesaikan oleh pengadilan. Tiga hari setelah peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002, Thalib membubarkan Laskar Jihad dan menyerukan anggotanya kembali ke rumahnya masing-masing. (Gatra; 2000)

Front Pembela Islam (FPI), FPI adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivist Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.

Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan orde baru presiden tidak mentoleransi tindakan ekstrimis dalam bentuk apapun. (Maulanusantara; 2008)

FPI pun berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa. (Maulanusantara; 2008)

Beberapa tuntutan FPI yang radikal antara lain; menyampaikan aspirasi ke Sidang Istimewa MPR 98 tentang Tuntutan Rakyat yang menghendaki: (Maulanusantara; 2008)

- 1) Pencabutan Pancasila sebagai Azas Tunggal
- 2) Pencabutan P4
- 3) Pencabutan Lima Paket Undang-undang Politik
- 4) Pencabutan Dwi Fungsi ABRI dari badan Legislatif atau Eksekutif
- 5) Penghargaan Hak Azasi Manusia
- 6) Pertanggungjawaban mantan Presiden Republik Indonesia
- 7) Permohonan Maaf GOLKAR sebagai Penanggung Jawab Orde Baru

Laskar Pembela Islam, merupakan anak organisasi Front Pembela Islam (FPI) kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan. Aksi kekerasan yang menonjol adalah Aksi kekerasan pada tanggal 1 Juni 2008, massa LPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang sedang memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Monas. FPI memukul orang-orang, termasuk di dalamnya ibu-ibu dan anak-anak, dengan benda-benda keras dan tumpul dan pasir. Puluhan orang terluka, patah hidung dan kepala bocor. Tak hanya memukul orang, massa FPI juga merusak mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut. (Maulanusantara; 2008)

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang terbentuk berdasarkan hasil Kongres Mujahidin I Indonesia untuk Penegakan Syariat Islam di Yogyakarta, pada awal Agustus 2000. Kongres ini menghasilkan Piagam Yogyakarta. Isi Piagam Yogyakarta antara lain menegaskan bahwa umat Islam, yang mayoritas di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban mengamalkan dan menegakkan syariat Islam, yang dipandang sebagai satu-satunya solusi terhadap semua krisis sosial politik dan kemanusiaan yang menimpa umat manusia. Karena itu, para mujahidin dalam kongres tersebut sepakat menyatakan: (Profil Majelis Mujahidin; 2010)

- 1) Wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi ummat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya,
- 2) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia.
- 3) Membangun satu kesatuan *shof* mujahidin yang kokoh kuat baik di dalam negeri, regional maupun internasional (antar bangsa).
- 4) Membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya *Imamah* (Khilafah)/Kepemimpinan ummat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan ummat Islam sedunia.
- 5) Menyeru kaum Muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Di samping Piagam Yogyakarta di atas, Kongres Mujahidin I juga menghasilkan Pokok-pokok Rekomendasi Kongres Mujahidin I untuk Penegakan syariat Islam di Indonesia. Rekomendasi ini berisi 31 butir seruan, yang antara lain mengajak setiap Muslim untuk melaksanakan dan memperjuangkan terlaksananya syariat Islam, mempererat *ukhuwah Islamiyah*, serta mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) dan menolak konsep negara sekuler. (Profil Majelis Mujahidin; 2010)

Jemaah Islamiyah, Kadangkala dieja *Jamaah Islamiah* adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris, sementara di Indonesia organisasi ini

telah dinyatakan sebagai “korporasi terlarang”. Menurut pernyataan intelijen, JI merupakan konfederasi beberapa kelompok Islam. (Khalimi; 2010: 189)

Sekitar tahun 1969, dua orang, Abu Bakar Ba’ashir, dan Abdullah Sungkar, dianggap melakukan operasi untuk mengembangkan Darul Islam, sebuah kelompok konservatif Islam. Abdullah Sungkar sudah meninggal, sedangkan Abu Bakar Ba’ashir sendiri membantah keterlibatannya dengan JI dan menyatakan tidak tahu menahu tentang JI. Meskipun JI dituduh melakukan pemboman di hotel JW Mariot, Jakarta, keterkaitan Abu Bakar Ba’ashir dengan aksi itu dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. (Khalimi; 2010: 189)

Menurut informasi intelijen, Jemaah Islamiyah mendapat bantuan keuangan dari kelompok teroris lain seperti Abu Sayyaf dan al-Qaeda. Jemaah Islamiyah berarti “Kelompok Islam” atau “Masyarakat Islam” dan dipemberitakan surat kabar disebut JI. Jemaah Islamiyah dicurigai melakukan aksi pengeboman di Atrium Senen (1998), Masjid Istiqlal (1999), gereja-gereja di beberapa kota besar pada malam Natal (2000), Rumah Dubes Filipina di Jakarta (2000), Kuta Bali (2002), Hotel J.W Marriot (2003), depan Kedutaan Besar Australia (2004), Legian Bali (2005). (Khalimi; 2010: 189)

Terlepas dari berbagai variannya, kelompok-kelompok Islam radikal tersebut tidak diragukan secara aktif dan sistematis mengusung dan memperjuangkan *Khilafah Islamiyyah* dan negara Islam. Sebagiannya lagi, memperjuangkan formalisasi syariah Islam melalui tangan kekuasaan. Dalam mewujudkan agenda dan ideologinya, mereka cenderung menyetujui jalan jihad yang diartikan perang suci, dan diam terhadap kekerasan atas nama agama, bahkan aksi-aksi teror.

Dalam hubungannya dengan non-muslim, kelompok radikal menjadikan mereka sebagai warga kelas dua dan tidak berhak untuk menjabat posisi kepala negara. Demikian halnya terhadap harkat perempuan, kelompok ini cenderung tidak toleran dan memasung hak-hak perempuan, dengan tidak memperkenankannya berkiprah di ranah publik dan pada akhirnya mengharamkan perempuan untuk menjabat posisi kepala negara.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum di awal Era Reformasi telah mendorong gerakan Islam mendesak pemerintah untuk menerapkan Syariat Islam sebagai solusinya. Pada gilirannya Islam radikal dijadikan jawaban atas lemahnya aparat hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam. Selain itu ketidakmampuan pemerintah bersikap tegas terhadap aliran yang melecehkan agama mengakibatkan kelompok tertentu melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang diduga melakukan pelecehan agama.

Diakui bahwa lahirnya gerakan Islam radikal Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan Islam radikal global yang berpusat di Timur Tengah, yang muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan politik Islam di Timur Tengah, ideologi masyarakat Barat yang sekuler dan materialistik serta faktor ketidak-adilan politik internasional terhadap negeri-negeri muslim. Bersumber pada pandangan dan citra terhadap fenomena gerakan Islam radikal di Timur Tengah, yang bukan hanya berusaha menentang dan menumbangkan dominasi negara oleh rezim sekuler dan bermusuhan terhadap Islam, tetapi juga kekuatan Barat yang dipercayai sebagai patron pemerintahan sekuler dan anti Islam. Barat khawatir meluasnya gerakan Islam radikal di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap Barat.

Jihad menjadi simbol perlawanan efektif untuk menggerakkan perang melawan Barat. Kondisi ini menyebabkan permusuhan berlanjut antara Islam dan Barat. Kalangan Islam radikal melihat Barat berada dalam pertarungan abadi melawan Islam. Di sisi lain kondisi seperti itu telah membentuk stigma yang keliru yang mengidentikkan Islam dengan gerakan radikal militan dan terorisme. Saat ini semua negara di dunia sedang mengkhawatirkan suatu gerakan terorisme yang berdasarkan ideologi keagamaan radikal dengan mengatasnamakan Islam, bahkan para ulama menyebutnya sebagai pembajakan ajaran agama Islam. Sejatinya, Islam sama sekali tidak membenarkan radikalisme karena Islam adalah agama kasih sayang (*rahmatan lil`alamin*).

Namun demikian, perkembangan radikalisme Islam di Indonesia perlu diwaspadai sebagai suatu kenyataan sosio-historis dalam negara majemuk, agar tidak menjadi ancaman bagi masa depan pluralisme di Indonesia. Oleh karena itu

diperlukan upaya untuk mengidentifikasi, memetakan dan mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan gerakan radikal militan (radikalisme).

2.1.2. Terorisme

Pada tahun 1950-an, sejarawan Inggris bernama Arnold Toynbee dalam bukunya *Civilization on Trial dan The World and The West* menyebutkan prediksinya bahwa perang sejati di abad berikutnya bukanlah antara komunis dan kapitalis, tetapi antara Barat dan Muslim. Hal ini terjadi karena menurut Toynbee, Barat dengan pemimpinnya Amerika bertekad menguasai seluruh dunia, untuk menjadi kekuasaan terbesar dalam sejarah. Soviet yang menjadi penghalang (saat itu) tidak akan bertahan lama karena mereka tidak beragama, tidak beriman dan tidak mempunyai substansi di belakang ideologi mereka. Suatu saat kaum Muslim akan menggantikan posisi Soviet karena mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Soviet.

Pada tahun 1990-an, prediksi tersebut justru lebih populer didengungkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Menurut Huntington, peradaban Barat dengan pemimpinnya Amerika yang semakin menghegemoni dunia memunculkan perlawanan dari kubu Islam karena identifikasi westernisasi merupakan ancaman bagi agama Islam sebagai satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan dan harapan.

Tetapi pendapat Huntington ini dibantah oleh Michael T. Klare satu dekade kemudian dalam bukunya *The Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. Menurut Klare, sumber konflik pasca Perang Dingin bukan peradaban sebagaimana dikemukakan Samuel Huntington, melainkan perebutan akses terhadap sumber daya alam seperti berlian, emas, tembaga, kayu, tanah, air serta minyak dan gas bumi. Pada abad ke-20, minyak bumi bersama sumber-sumber daya mineral lain merupakan salah satu sumber konflik. Tetapi pada abad ke-21 menurut Klare, minyak bumi menjadi sumber konflik paling penting dibanding sumber-sumber daya lainnya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Klare, seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman bernama Jurgen Habermas juga menolak hipotesis yang diajukan

Huntington dalam tulisan *Merekonstruksi Terorisme*. Menurut Habermas dalam penyebab penyakit komunikasi yang ditimbulkan oleh globalisasi bukan bersifat kultural melainkan ekonomis. Hal ini terjadi karena banyak negara berkembang mempersepsikan politik luar negeri Barat sebagai garis depan imperialisme dan sifat konsumerisme Barat dianggap banyak merugikan mereka. Kondisi ini membangkitkan reaksi spiritual yang dilihat sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari sikap bungkam mulut dan penurut. Atau dengan kata lain benturan peradaban (agama) sebenarnya dipicu oleh persepsi imperialisme ekonomi. Istilah imperialisme ekonomi ini dipopulerkan oleh James Petras dan Henry Veltmeyer dalam buku *Empire with Imperialism* sebagai imperialisme abad 21

Imperialisme ekonomi yang dilakukan Barat, dalam hal ini Amerika, dinyatakan tersirat dalam strategi keamanan nasional mereka. Dalam dokumen berjudul *The National Security Strategy of the United States of America* bertanggal terbit 22 September 2002 secara tegas menyebutkan misi mewujudkan free markets dan free trade ke seluruh penjuru dunia sebagai key priorities pada strategi keamanan nasional Amerika. Sedangkan Spencer Abraham, US Secretary of Energy di masa pemerintahan George W. Bush sebagaimana dikutip Michael T. Klare dalam buku *Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Petroleum Dependency*, mengatakan bahwa ketahanan atau keamanan energi adalah komponen dasar bagi keamanan nasional karena energi adalah sumber utama tempat bergantung seluruh infrastruktur ekonomi, industri dan pertahanan Amerika.

2.1.2.1. Beberapa Definisi Tentang Terorisme

Tidak seperti bentuk kejahatan lainnya, terorisme adalah suatu kejahatan yang sulit sekali didefinisikan secara universal. Meskipun demikian namun seluruh dunia telah sepakat bahwa terorisme adalah suatu kejahatan yang harus dilawan. Terorisme adalah kekerasan, tetapi tidak semua bentuk kekerasan adalah terorisme. Sangatlah penting untuk mengetahui bahwa terorisme, meskipun sulit didefinisikan dengan tepat, tidaklah sama dengan perang sipil, kejahatan, atau perang gerilya.

Istilah gerilya biasanya memiliki konotasi positif dalam bahasa kita, berbeda dengan terorisme yang hampir pasti selalu bermakna negatif. Media pemberitaan Inggris dan Perancis akan menyoroti tindakan operasi teroris di London dan Paris, dan tanpa ragu menyebut pelakunya sebagai “teroris”. Tetapi mereka tidak akan menggunakan istilah kasar ini terhadap pelaku peledakan yang terjadi di negara lain, mereka cenderung menggunakan istilah yang lebih netral seperti “pelaku bersenjata”, “militan Islam”, atau yang lainnya, bahkan menggunakan istilah “gerilyawan kota”. Padahal, istilah gerilyawan kota adalah suatu istilah yang kontradiktif. Strategi perang gerilya adalah untuk membebaskan suatu wilayah, untuk menegakkan institusi tandingan dan dengan menggunakan tentara reguler, dan biasanya perang ini dilakukan di hutan, gunung, atau wilayah-wilayah yang jarang penduduknya. Kasus klasik perang gerilya adalah perang yang terjadi di Cina antara tahun 1930-an dan 1940-an; contoh lainnya misalnya perlawanan Vietnam terhadap penjajah Perancis dan perjuangan Castro di Kuba. Sangatlah jelas tidak mungkin untuk mendirikan wilayah bebas di dalam kota, dan dengan alasan ini penggunaan istilah gerilyawan kota yang tidak tepat dan salah kaprah ini biasanya bermotivasi politis atau berdasarkan kesalahpahaman dalam membedakan antara gerilya dan teroris. Yang membuat keadaan ini menjadi lebih rumit adalah kenyataan bahwa seringkali gerilya dilakukan dalam bentuk tindakan teroris baik di pedesaan maupun di pusat kota. Contoh yang paling dramatis adalah yang terjadi di Aljazair pada tahun 1990-an.

Ada lagi kesalahpahaman lainnya terkait dengan motif dan ciri-ciri terorisme. Perdebatan lainnya mengenai terorisme adalah juga pada siapa yang disebut sebagai teroris, ada yang menolak untuk menggunakan istilah terorisme terhadap sekelompok kecil orang yang melakukan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap pemerintahan yang mapan atau beberapa bagian dalam masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa istilah terorisme seharusnya dilekatkan pada negara. Sangatlah benar bahwa dalam sejarah penguasa tirani lebih banyak menyebabkan penderitaan dibandingkan teroris, tetapi ada argumen yang kuat; sama halnya seseorang bisa menyatakan bahwa tidaklah bermanfaat untuk mencari obat bagi penyakit AIDS karena penyakit ini membunuh lebih sedikit orang dibandingkan penyakit kanker atau jantung, atau bahwa pelajaran bahasa

Perancis tidak perlu dilanjutkan karena jumlah orang Cina di dunia adalah dua puluh kali lipat dibandingkan jumlah orang Perancis.

Menurut Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, persoalan belum adanya suatu pendefinisian yang universal ini adalah karena adanya kepentingan politik di tiap-tiap negara. Jika dilihat, secara umum saat ini terdapat dua titik ekstrem dalam melihat terorisme itu sendiri:

“Memang sekarang ini ada 2 titik ekstrem, dititik ekstrem yang satu, barat, menganggap setiap ancaman terhadap kemanusiaan baik itu terhadap kelompok maupun perseorangan, itu terorisme. Di ekstrem lain justru terbalik, justru reaksi barat terhadap ancaman itu, itu adalah terorisme. Nah, inilah sebabnya mengapa tidak ada, belum ada definisi universal. Yang menurut saya tidak akan pernah ada definisi universal itu, karena memang ada didua titik ekstrem ini. Yang satu menganggap setiap ancaman terhadap manusia, penculikan atau apa, kan banyak warga Amerika yang diculik, nah itu terorisme. Hal ini direspon (oleh Amerika), nyawa warga negara biarpun satu orang, dia mau perang. Nah dipihak lain, justru respon seperti itulah terorisme. Jadi akhirnya tidak jelas siapa yang memulai teror? Seperti telur dengan ayam.” (wawancara dengan Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai tanggal 23 Juli 2007)

Kata teror sendiri berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja, *terrere* berarti membuat takut atau menakut-nakuti. Menurut Dr. Petrus Reinhard Gollose dalam bukunya yang berjudul “Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput”, dengan mengutip New World Dictionary, kata terorisme berasal dari bahasa Perancis *terrorisme*. Penggunaan istilah tersebut digunakan pasca terjadinya revolusi, dan dimulainya *Reign of Terror* di Perancis antara tahun 1793-1794, pemerintahan yang berkuasa mempraktekkan cara-cara teror dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Hal itu mengungkapkan bahwa penggunaan kata *terror* di Inggris juga diterima sebagai penyebutan suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi, pertama kalinya pada tahun 1798. Penyebutan Istilah

tersebut kemudian mengawali pengenalan terhadap kata terror di seluruh dunia. Jelaslah bahwa Istilah terorisme baru dipahami dan populer mulai tahun 1798 (Golose, 2009: 1-2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 1048), terorisme diartikan sebagai “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. Kata terorisme adalah “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)”.

Dalam Encyclopædia Britannica Online disebutkan bahwa terorisme adalah (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism>):

“the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. Terrorism has been practiced by political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence services, and police.

(terj: “penggunaan kekerasan yang sistematis untuk menciptakan suatu suasana ketakutan umum dalam suatu populasi dan dengan cara demikian untuk suatu tujuan politik tertentu. Terorisme dilakukan oleh organisasi politik baik kelompok kanan maupun kiri, oleh kelompok-kelompok nasionalist dan kelompok-kelompok keagamaan, oleh revolusioner, dan bahkan oleh lembaga negara seperti tentara, badan intelijen, dan polisi.”)

Dari sebuah forum curah pendapat (*brain-storming*) antara para akademisi, profesional, pakar pengamat politik, dan diplomat terkemuka yang diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis, dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran resmi atau jalur hukum (Buletin Litbang Dephan, 2008).

Ezzat E. Fatah seorang ahli kriminologi mendefinisikan terorisme yaitu (Nitibaskara, 2002):

“Terrorism comes from teror, which come Latin ‘terre, meaning to frighten. Organilly, the word ‘terre’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ was employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission”.

(Terorisme berasal dari kata teror, dalam bahasa Latinnya ‘terre’ yang artinya menakut-nakuti. Sebenarnya kata ‘terre’ digunakan untuk menentukan suatu cara mengatur, dan kata ‘terrorism’ digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror secara sistematis, terutama dengan tindakan mengatur agar menyerah).

Pada tahun 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) melalui *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, pada pasal 2 ayat 1 bagian (b) mendefinisikan terorisme sebagai berikut (<http://www.un.org/law/cod/finterr.htm>):

“Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act”.

(Tiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius terhadap rakyat sipil, atau terhadap orang lain yang tidak ada terlibat dalam suatu peperangan dalam suatu pertikaian bersenjata, tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan).

Definisi terorisme juga datang dari negara-negara dalam kawasan tertentu, yang tergabung dalam suatu wadah untuk bekerja sama memerangi terorisme. Seperti halnya negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melalui The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, diadopsi oleh Council of Arab Ministers of the Interior and the Council of Arab Ministers of Justice. Yang

dilaksanakan di Kairo pada bulan April 1998 mendefinisikan terorisme sebagai berikut (<http://www.al-bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm>):

“Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs in the advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to sow panic among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or seeking to cause damage to the environment or to public or private installations or property or to occupying or seizing them, or seeking to jeopardize a national resources”.

(Setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apa pun motif dan tujuannya, yang terjadi dalam peningkatan suatu agenda jahat seseorang atau kolektif dan berusaha menyebarkan kepanikan di antara orang-orang, yang menyebabkan ketakutan dengan membahayakan mereka, atau menempatkan hidup, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya, atau berusaha menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau terhadap publik atau instalasi pribadi atau harta benda atau menduduki atau menyita instalasi atau harta benda tersebut, atau berusaha membahayakan sumber daya nasional).

Pengertian tindak pidana terorisme di Indonesia termuat dalam Pasal 6 dan 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, berikut adalah bunyi dari kedua pasal-pasal tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun”.

Penjelasan: yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Hal itu termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Penjelasan: yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” lihat penjelasan Pasal 6.

Harvey W. Kushner dalam bukunya yang berjudul “Encyclopedia of Terrorism” mengatakan bahwa adalah suatu hal yang mustahil untuk mendefinisikan ataupun mengklasifikasikan terorisme yang dapat memuaskan semua pihak. Kushner menyebutkan alasan sulitnya membuat satu definisi tentang terorisme adalah karena perbedaan ideologi politik dan kepentingan. Namun setidaknya ada tiga faktor yang disepakati dalam pendefinisian terorisme, yaitu: 1) metode yang digunakan adalah kekerasan; 2) sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah; dan 3) tujuan untuk menciptakan ketakutan dan memaksakan perubahan politik atau sosial (Kushner, 2003: xxiii)

Selain definisi-definisi tersebut, Laqueur, sebagaimana dikutip oleh Anthony Oberschal (Oberschal; 2004: 26), mendefinisikan terorisme sebagai: “*the use of covert violence by a group for political ends*” (penggunaan kekerasan terselubung oleh suatu kelompok untuk tujuan-tujuan politik). Definisi Lacqueur ini menekankan pada empat atribut utama terorisme yaitu: (1) terorisme adalah

tindakan kelompok, bukan individu; (2) Terorisme adalah politis, bukan kejahatan; (3) Terorisme selalu terselubung, bukan merupakan perang konvensional; dan (4) Terorisme pasti adalah kekerasan. Tujuan politik adalah – kemerdekaan nasional, keadilan sosial, dan perlakuan yang sama bagi minoritas – dipandang luas sebagai tujuan politik yang sah dan sering memiliki banyak dukungan populer. Apa yang khas dari terorisme bukanlah pada tujuannya tetapi pada cara mencapai tujuan tersebut: kekerasan oleh kelompok teroris dilakukan dengan cara tanpa peringatan dan selalu tidak memilih korban tertentu, bahkan seringkali orang yang tidak bersalah yang menjadi korbannya. Menurut Oberschall terorisme hanyalah salah satu cara dari beberapa modus konfrontasi yang menjangkau dari tindakan politik yang konvensional dan damai hingga ke kelompok kekerasan yang ekstrim. Namun demikian, untuk mencapai tujuan politiknya, teroris membutuhkan dukungan dari beberapa kelompok masyarakat. IRA, misalnya selalu memberikan peringatan kepada polisi dan media massa bahwa mereka telah memasang bom disuatu tempat, tujuan pemberitahuan ini adalah agar polisi mempunyai waktu untuk mengevakuasi masyarakat. Tujuan yang sebenarnya dari teroris ini adalah untuk menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah untuk menghancurkan organisasinya, bukan untuk membunuh dan menyasar masyarakat.

2.1.2.2. Dari Tulisan Menjadi Perbuatan

Dua tindakan teroris yang paling penting pada abad ke-19 terjadi pada bulan Maret tahun 1881 dan bulan Mei tahun 1882, yaitu pembunuhan Tsar Alexander II, dan pembunuhan Lord Cavendish, sekretaris negara pada pemerintahan Inggris di Irlandia dan Thomas Henry Burke, ajudan resmi Lord Cavendish. Seperti yang terjadi di Irlandia, tradisi revolusi di Rusia yang terjadi selama bertahun-tahun diawali dengan pembunuhan Tsar, namun sebenarnya kedua peristiwa ini tidak seharusnya diawali dengan tindak terorisme. *Narodnaya Volya (People's Will)*, yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Tsar, diawali dari kegiatan politik yang berusaha mempropagandakan ide membangkitkan para petani, namun seperti telah diketahui hal ini mengalami kegagalan total ketika kelompok revolusioner tidak hanya menyasar para petani. Akibatnya terjadi perpecahan di kelompok revolusioner, dengan klaim teroris bahwa dengan

membunuh pemimpin kelompok lawan adalah jauh lebih efektif dari segi biaya dibandingkan aksi politiknya kelompok Marxist. Sebagian kecil kelompok masyarakat bisa mengakibatkan kerusakan yang besar jika 10 atau 15 pilar keamanan dibunuh sekaligus; pemerintah akan panik dan massa akan bangkit. Namun demikian ideolog teroris Rusia tidak pernah segera melakukannya meskipun mereka mengharapkan pemerintahan segera runtuh dan terjadi disintegrasi. Teroris kemudian memastikan bahwa tahapan ini dapat dicapai dalam waktu antara dua sampai tiga tahun. Sebaliknya, jika pemerintah siap memberikan konsesi, seperti memberikan kebebasan untuk berbicara dan hak untuk berorganisasi, teroris akan menghentikan perjuangannya dan mempertimbangkan lagi situasinya.

Pembunuhan Tsar dimulai pada tahun 1878 dengan operasi teroris yaitu penembakan Jenderal Trepov, gubernur Moskow oleh Vera Figner. Opini publik yang muncul adalah Vera seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan di persidangan. Sebenarnya, pada saat itu sebagian besar pejabat negara masih berfikir bahwa yang terjadi adalah perjuangan bersenjata, yang terjadi adalah “kelas melawan kelas”, terhadap kapitalisme dan bukan terhadap negara, dan para pejabat negara berfikir bahwa negara harus tetap netral dalam pertempuran ini. Pada saat yang bersamaan, Nikolai Mezentsev, kepala kepolisian negara, juga ditembak karena perannya dalam melakukan penahanan dan perlakuannya terhadap anggota kelompok *Narodnaya Volya*.

Pandangan politik sebagian kelompok militan saat itu sangat ekstrem, sementara yang lainnya lebih moderat, namun keduanya memiliki keyakinan yang sama. Dua teroris yang paling aktif, Tikhomirov dan Romanenko, kemudian berpindah ke kelompok ekstrem kanan, sementara teroris lainnya, Morozov, menjadi anggota Kadets⁵ pusat. Teroris menyatakan bahwa mereka tidak hanya memerangi tirani yang nyata jelas seperti di Rusia, tetapi juga penindasan

⁵ Anggota dari Constitutional Democratic Party, juga disebut Party of People's Freedom, dalam bahasa Rusia Konstitusionno-Demokraticheskaya Partiya, atau Partiya Narodnoy Svobody. Kadets adalah partai politik Rusia yang mendukung perubahan radikal dalam pemerintah Rusia dari bentuk monarki konstitusional (constitutional monarchy) seperti kerajaan Inggris. Kadets didirikan pada bulan Oktober tahun 1905 oleh Union of Liberation dan kelompok liberal lainnya yang berasosiasi dengan zemstvos, dewan lokal yang selalu menjadi pusat opini dan agitasi liberal. (diterjemahkan dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/309473/Kadet>)

konstitusional seperti di Jerman; mereka tidak akan ragu-ragu untuk membunuh diktator seperti Bismarck, meskipun pemerintahan yang dipimpinnya menggunakan kerangka semidemokratis. Sementara itu, dua minggu setelah pembunuhan terhadap Kaisar Alexander II, komite eksekutif *Narodnaya Volya* menyatakan dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada pengganti Alexander II bahwa terorisme adalah pilihan yang paling buruk, dan karena itulah mereka menginginkan amnesti umum dan konstitusi mengakui kebebasan dasar. Pada tahun-tahun kemudian dinyatakan bahwa teroris sebenarnya bukanlah ekstremis tetapi liberal dengan bom (*liberals with a bomb*), dalam negara yang represif, meskipun ringan, dan masyarakat yang moderat akan bergabung dengan teroris karena hati nurani mereka telah didikte oleh penguasa.

Terorisme adalah merupakan manifestasi dari krisis umum yang terjadi di masyarakat Rusia. Vera Figner, yang menjadi pelaku serangan yang memulai semua ini, menulis dalam suratnya bahwa teror saat itu adalah seperti badai besar dalam suatu ruang yang melingkupinya: *“The waves were rising high but the unrest did not spread. It exhausted the moral force of the intelligentsia.”* Setelah pembunuhan Tsar, banyak pelaku segera ditangkap dan dihukum, dan keadaan di Rusia relatif tenang selama 20 tahun. Jumlah konspirator mengecil, dan sementara mereka menikmati simpati yang diperoleh dari kaum terpelajar dan kelas menengah, mereka tidak memiliki cukup pengganti untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka semuanya sangat muda dan kebanyakan dari mereka adalah pelajar, tetapi diantara mereka juga ada perempuan muda dan pekerja, termasuk Zhelyabov yang kemudian memimpin operasi melawan Tsar.

Dilihat dari perspektif sejarah, terorisme *Narodnaya Volya* sebenarnya kontraproduktif. Tsar Alexander II digantikan oleh rejim penguasa yang lebih represif yaitu Alexander III. Pembunuhan justru menutup pintu penyelesaian politik krisis Rusia dan menyebabkan revolusi pada tahun 1917. Rejim Tsar bertanggung jawab atas peristiwa 1917, namun kegiatan teroris, dengan melihat tujuan politiknya, sama sekali tidak membantu menyelesaikan masalah krisis politik yang berlanjut.

Tradisi *Narodnaya Volya* seakan telah mati, tetapi gelombang kedua terorisme yang terorganisir dan sistematis dimulai dengan pendirian *Social Revolutionary Party* pada tahun 1900. Tidak seperti pendahulunya, partai ini menerapkan tindakan politik yang dikombinasikan dengan pemogokan industri dan pemberontakan petani, dan, sangat berbeda dengan *Marxist Social Democrats*, mereka mendukung terorisme. Partai ini mendirikan sayap bersenjata yang disebut BO (*Boevaya Organisatsia – Fighting Organization*) yang menggoyang pondasi pemerintahan. Ada dukungan terhadap terorisme yang lebih besar dari masyarakat dibandingkan 25 tahun yang lalu, dan setelah pembunuhan Plehwe, menteri dalam negeri yang sangat dibenci, beberapa pemimpin *Social Democrat* bahkan sepakat mendukung terorisme dalam keadaan tertentu. Korban yang jatuh sebagai akibat teror diantaranya adalah menteri pendidikan; dua menteri dalam negeri; dua kepala polisi Moskow; perdana menteri Stolypin; dan Grand Duke Serge Aleksandrovich, gubernur jenderal Moskow.

Perbedaan penting antara terorisme gelombang pertama dan gelombang kedua adalah pada luasnya jangkauan operasi teroris. *People's Will* beroperasi terkonsentrasi hampir di seluruh bagian dua kota besar, sementara terorisme *Social Revolutionary* aktif hingga luar negeri. Gubernur jenderal Finlandia dan pendukungnya dibunuh, dan ada sejumlah pembunuhan lainnya di wilayah perbatasan, termasuk Armenia dan Polandia, dan kota kecil lainnya.

Dampak dari ketiadaan hukum dan hilangnya kekuasaan pemerintah selama perang Rusia – Jepang (1904-1905), terjadi penculikan, perampokan bank dan sejumlah perampasan. Tidak ada pemimpin yang merasa dirinya aman dalam sistem yang mapan, dan suasana sikap menyerah menyebar ke sekuruh negara. Revolusi tahun 1905 menyebabkan sejumlah kelonggaran pada beberapa bagian dari pemerintahan yang konstitusional. Pada akhirnya, menyebabkan menurunnya kegiatan teroris, bagi gerakan politik, pemogokan dan demonstrasi juga akan menghasilkan hal yang sama, jadi sebenarnya melakukan terorisme adalah hal yang sia-sia. Tetapi rejim Tsar segera menemukan kembali kekuasaannya begitu mesin penggerak revolusi kehabisan tenaga, dan ketika kegiatan teroris berakhir pada tahun 1906 penguasa berhasil mewujudkan keinginannya.

Boevaya Organisatsia berhasil ditembus oleh pihak kepolisian; Azev, pemimpin organisasi tersebut, dan banyak anggota lainnya kemudian menjadi mata-mata bagi polisi. Rekan-rekan Azev menolak untuk percaya dan hidup dalam penyangkalan selama beberapa tahun, tetapi begitu bisa dibuktikan, semangat tempur kelompok militannya dengan segera terdisintegrasikan dan puncaknya adalah terjadinya saling ketidakpercayaan. Hingga pada akhirnya pemerintahan Tsar melihat suatu peluang yang bagus, setelah 1906 dinyatakan bahwa negara berada dalam keadaan darurat di beberapa bagian Rusia. Pengumuman keadaan darurat ini diikuti dengan penerapan peradilan militer, dan menerapkan hukum ala Draconian⁶ yang digunakan tanpa keraguan. Angka hukuman mati meningkat dari 144 pada tahun 1906 menjadi 1.139 pada tahun 1907, dan kemudian menurun menjadi 825 pada tahun 1908. Jumlah keseluruhan keputusan hukuman mencapai ribuan, dan sebagian besar adalah hukuman kerja paksa. Tidak semua teroris berhasil ditangkap, namun tindak terorisme di Rusia mulai berkurang tidak seperti sebelumnya. Terorisme belum berhasil menyingkirkan rejim yang berkuasa. Pembunuhan perdana menteri Stolypin pada tahun 1911 tidak menyebabkan guncangan politik, dan tidak ada serangan teroris yang besar selama tahun-tahun tersebut hingga terjadinya revolusi tahun 1917.

2.1.2.3. Karakteristik Terorisme

Menurut US Army Training and Doctrine Command (2007) terdapat beberapa alasan yang memunculkan motivasi terjadinya pergerakan teroris, antara lain sebagai berikut (US Army Tradoc; 2007):

- 1) **Separatisme.** Motivasi gerakan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan, kedaulatan, kekuasaan politik, atau kebebasan beragama.

⁶ Kitab undang-undang bangsa Athena tradisional yang diperkenalkan oleh Draco pada tahun 621 SM. Aristotle, filsuf yang menulis tentang Draco, menyatakan bahwa Draco adalah penulis hukum bangsa Athena yang pertama dan Draco menerapkan konstitusi yang memberikan kewenangan pada *hoplite* (tentara pangkat terendah pada negara Yunani kuno). Hukum Draconian paling dikenal karena kerasnya hukuman yang dijatuhkan sehingga banyak yang mengatakan bahwa hukum ini tidak ditulis dengan tinta tetapi ditulis dengan darah. Hukuman mati diterapkan pada hampir semua pelaku kejahatan. Solon seorang *archon* (hakim) pada tahun 594 SM kemudian menghapuskan hukum Draco dan menggantinya dengan hukum yang baru, dan hanya mempertahankan hukum Draco yang mengatur tentang hukuman bagi kejahatan pembunuhan. (diolah dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/170684/Draconian-laws>)

- 2) **Etnosentrisme.** Motivasi gerakan dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan akan adanya penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan tersebut, membuat seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari golongan ras yang lebih tinggi, melakukan tindakan teror terhadap orang-orang yang memiliki ras lebih rendah. Tujuan teror tersebut sebagai unjuk kekuatan dan kekuasaan agar memperoleh pengakuan dari ras-ras yang lainnya bahwa rasnya lebih unggul.
- 3) **Nasionalisme.** Gerakan ini dimotivasi oleh kesetiaan dan ketaatan pada paham nasional. Paham ini diterima dan ditempatkan sebagai suatu kesatuan budaya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi perhatian utama bagi kelompok nasionalis. Hal ini sebagai faktor yang memotivasi kelompok tersebut.
- 4) **Revolusioner.** Gerakan yang termotivasi untuk melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintah yang berkuasa, baik itu perubahan politik maupun struktur sosial. Gerakan ini identik dengan politik dan idealisme komunis. Berbeda dengan apa yang dimuat di atas, Hoffman (2008: 414) mengidentifikasi enam motivasi terorisme, bahkan Hoffman memasukkan gangguan kejiwaan sebagai motivasi terorisme.

Dari klasifikasi tersebut, Hoffman membuat suatu matriks Klasifikasi Motivasi Terorisme, sebagai berikut: (Golose; 2009: 7)

Tabel 2.1. Klasifikasi Motivasi Terorisme

Motivasi	Pelaku Kejahatan (Agents to Violence)	Aktivitas
Nasionalis-Separatis	Separatis dan gerakan otonomi daerah, etnik merupakan dasar kekuatan.	Anti terhadap pemerintahan, kekerasan inercommunal, melakukan penyerangan terhadap daerah yang aman.
Religius	Ekstrim fundamentalis (Kelompok Islam garis keras seperti AI-Jama'ah Islamiah (JI), Hindu garis keras seperti Sikh di India, dan Macan Tamil di Sri Lanka).	Melakukan serangan terhadap masyarakat sipil, serangan tersebut dapat berupa serangan bom bunuh diri.
Ideologi (kepercayaan pada politik tertentu)	Kelompok politik sayap kanan dan sayap kiri seperti gerakan fasis di Jerman dan Itali.	Menyebarkan propaganda kebencian, anti terhadap imigran dan melakukan aksi pengeboman.
Isu utama (single issue)	Permasalahan terhadap kelangsungan lingkungan dan makhluk hidup.	Sabotase dan menyebarkan ancaman pengeboman terhadap objek-objek vital.
Negara sponsor	Penekanan oleh sebuah rezim pemerintahan	Sabotase dan penggunaan senjata kimia
Penderita sakit jiwa (<i>mental disorders</i>)	Individu.	Pengeboman dan perampokan.

Sumber: Bruce Hoffman

Oberschal menyatakan menyatakan bahwa teroris adalah merupakan suatu kelompok kecil, yang bersembunyi di dalam suatu populasi besar yang damai maupun yang traumatis. Biasanya polisi dan militer meyakini bahwa sistem peradilan pidana tidak mampu untuk menghadapi teroris dan melindungi masyarakat yang menjadi sasarannya. Dengan alasan inilah biasanya polisi dan militer kemudian menggunakan metode ilegal terselubung – seperti penyiksaan, asasinasi, tindakan balasan kolektif – yang dilakukan oleh “pasukan khusus” terhadap teroris dan para simpatisannya bahkan seringkali juga terhadap semua orang yang dinyatakan melawan pemerintah. Terorisme oleh negara ini, baik yang didukung maupun disangkal oleh pihak berwenang, cenderung menggantikan

kontrol sosial yang sah. Terorisme oleh negara selalu meluas dan meningkat seiring dengan kerawanan dan terorisme, bahkan dalam jangka waktu yang lama menunjukkan keberhasilan untuk menekan kerawanan dan terorisme. Bahkan pemerintah yang demokratis sekalipun dalam menghadapi terorisme melakukan cara-cara penanganan yang luar biasa dari kontrol sosial. Kontrol sosial terhadap terorisme cenderung untuk melampaui keterbatasan hukum, dan dalam beberapa kasus justru memunculkan terorisme oleh negara. Kekerasan yang dilakukan oleh teroris juga cenderung mengalami peningkatan, menjadi lebih keras, lebih banyak korban yang jatuh, dan lebih brutal. (Oberschal; 2004: 29)

2.1.2.4. Profil Pelaku Terorisme

Siapakah orang yang berada dibalik gerakan teroris? Adakah ciri-ciri yang terlihat jelas diamati yang dapat membedakannya dari individu atau kelompok lainnya? Kelompok teroris seringkali beranggotakan pemuda-pemuda terdidik dari kelas menengah, tetapi ada juga terorisme yang dilakukan oleh petani dan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tersingkir dari masyarakat. Dalam sedikit kasus – misalnya Molly Maguires⁷ di Amerika Serikat – terorisme dilakukan oleh kelas pekerja, namun demikian jelas sekali bahwa hal ini adalah perkecualian.

Dalam kelompok separatis-nasionalis, unsur kelas menengah biasanya kurang memiliki pengaruh terhadap sel teroris ekstrem kiri. Gerakan pembebasan nasional dan revolusi sosial berubah menjadi terorisme setelah gerakan politik gagal. Tetapi terorisme juga menjadi pilihan pertama yang diambil oleh kelompok militan yang tidak sabar segera melakukan perubahan.

Pembunuhan terhadap pejabat negara yang memimpin juga dilakukan terhadap rejim totaliter modern, namun tindakan balasan yang dilakukan untuk menindas terorisme yang dilakukan oleh negara totaliter jauh lebih efektif

⁷ Organisasi buruh di pertambangan batu bara di Pennsylvania dan West Virginia yang melakukan kekerasan. Didirikan pada kira-kira tahun 1865 yang akhirnya menjadi kelompok teroris yang terlibat dalam kegiatan kejahatan. Molly Maguires sebenarnya adalah nama suatu masyarakat rahasia yang dibentuk di Irlandia pada tahun 1843 pada waktu musim paceklik ketang yang buruk. Tujuan pembentukan masyarakat rahasia ini adalah untuk menakuti penagih sewa, tuan tanah, dan siapapun yang menindas pemogokan yang dilakukan oleh orang miskin. Kelompok ini dinamakan menurut nama seorang janda yang suaminya terbunuh karena tidak mampu membayar hutangnya. (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/388451/Molly-Maguires>)

dibandingkan terorisme yang paling sistematis. Terorisme nyaris tidak terjadi pada masyarakat dimana kekerasan bukanlah bagian dari tradisi dan budaya politiknya, beberapa negara di dunia benar-benar bebas dari terorisme.

Penindasan oleh negara dan ketimpangan sosial seringkali disebut sebagai akar penyebab terorisme, sehingga karena itulah kelompok-kelompok perlawanan yang ada di masyarakat itu sendiri kemudian menjadi teroris. Akan tetapi hal ini tidak menjelaskan mengapa perjuangan untuk kebebasan politik, kemerdekaan, atau pemisahan diri tidak selalu berujung pada terorisme, dan mengapa beberapa kelompok minoritas memilih melakukan terorisme sementara kelompok minoritas lainnya tidak melakukannya. Sejarah menunjukkan bahwa mengukur suatu penindasan dalam suatu standar yang disepakati adalah masalah yang pelik; terorisme pada umumnya adalah masalah persepsi, sejarah, sosial, dan tradisi kebudayaan, serta perhitungan politik.

Generalisasi mengenai terorisme adalah suatu hal yang sulit karena alasan tertentu. Kelompok teroris biasanya adalah kelompok kecil; bahkan beberapa sangat kecil. Ketika ahli sejarah dan sosiologi menjelaskan tentang gerakan massa, gerakan partikel kecil dalam politik, seperti halnya dalam ilmu fisika, seringkali membutuhkan penjelasan yang berbeda. Beberapa serangan pembunuhan dalam sejarah, termasuk pembunuhan terhadap Kennedy presiden Amerika Serikat, ternyata dilakukan oleh individu tunggal bukannya suatu kelompok; investigasi yang dilakukan terhadap pelaku mengenai motif mereka ternyata seringkali cenderung masuk pada persoalan psikologi daripada politik.

Jadi dapat dikatakan bahwa generalisasi tentang terorisme yang dapat dibuat hanyalah mengenai pendorong utama terorisme, strateginya, dan taktiknya. Jarang sekali ada teroris yang berasumsi bahwa mereka akan dapat meraih kekuasaan – kebanyakan teroris meyakini strategi provokasi. Teroris Irlandia yakin bahwa serangan mereka akan berdampak terjadinya kontraterorisme yang kemudian akan membangkitkan semangat perlawanan bangsa Irlandia, dan pada akhirnya Inggris akan memberikan konsesi-konsesi. Revolusioner Rusia memutuskan untuk membunuh duta besar Jerman untuk Moskow dan gubernur Kiev pada tahun 1918, berasumsi bahwa hal ini akan memulai permusuhan antara

rejim Soviet yang masih muda dan kerajaan Jerman. Dengan cara yang sama teroris Armenia sebelum tahun 1914 dan teroris Palestina setelah tahun 1967 melakukan tindak terorisme dengan tujuan mengundang campur tangan pihak asing.

Pemilihan korban seringkali tergantung pada situasi; teroris Rusia pada awalnya mengkonsentrasikan serangannya terhadap pejabat negara dibawah tsar yang menunjukkan kebrutalan, namun kemudian juga membunuh pemimpin politik yang moderat yang mereka anggap sebagai musuh politik yang lebih berbahaya. Contoh lainnya adalah, pembunuhan Walther Rathenau, menteri luar negeri Jerman, dan politikus Italia Aldo Moro, dan Grand Duke Franz Ferdinand dari Austria yang dibunuh oleh teroris Serbia karena dia mempunyai reputasi sebagai liberal yang ingin memberikan konsesi.

Dalam beberapa kesempatan, teroris berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, Count Orsini⁸ bertindak sendiri dengan melakukan serangan bom yang spektakuler di Paris pada tahun 1857, tindakannya ini memaksa Napoleon III untuk memutuskan memberikan bantuan militer kepada Italia untuk melawan Austria. Orsini tidak akan berhasil kecuali karena Napoleon III mempunyai kepentingan dengan kebijakannya dalam beberapa kasus. Terorisme yang berhasil biasanya karena tuntutan teroris tersebut sangat terbatas dan disebutkan dengan jelas. Gaji pekerja konstruksi besi di Amerika meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 1905 dan 1910 karena ada hubungan tidak langsung dengan fakta bahwa pada periode ini sekitar ratusan gedung dan jembatan di bom. Sebagai kemungkinan, teror yang sistematis akan berhasil jika dilakukan dalam suatu kerangka kerja strategi yang lebih luas. Kemudian, Vietkong membunuh sekitar 10.000 penduduk desa berusia lanjut pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, dan FLN Aljazair yang secara sistematis membunuh rival politik mereka yaitu

⁸ Felice Orsini lahir 10 desember 1819 di Meldola, Papal (sekarang di Italia), meninggal 13 Maret 1858 di Paris, Perancis. Seorang nasionalis revolusioner Italia dan konspirator yang mencoba membunuh kaisar Perancis Napoleon III. Anggota revolusioner Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini, Orsini ikut serta dalam pemberontakan di Roma pada tahun 1848-1849, kemudian bekerja sebagai agen Mazzini di Swiss, Hongaria, dan Inggris. Setelah melarikan diri dari penjara Mantua di Austria pada tahun 1855, dia pergi ke Londondan menulis dua buku petualangannya yaitu *The Austrian Dungeons in Italy* (1856) dan *Memoirs and Adventures of F. Orsini Written by Himself* (1857). (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/433259/Felice-Orsini>)

pengikut Messali Haj, sebagai tindakan yang mengawali suatu strategi yang lebih luas dan ambisius.

Banyak kelompok teroris yang tanpa ragu menyerang polisi dan rakyat sipil namun menunjukkan keengganan untuk menyerang militer. Mereka besar kemungkinan berasumsi bahwa militer akan menjadi sasaran yang paling sulit dan akan berakibat pada tindakan balasan yang lebih masif.

Selain itu ada lagi perbedaan yang menarik antara teroris abad ke-19 dengan teroris abad ke-20. Teroris abad ke-19 mengharapkan untuk dihukum mati atau menjalani hukuman penjara dalam waktu lama sebagai akibat perbuatannya. Sementara teroris pada masa sekarang bersikap sebaliknya, lebih sering menganggap bahwa tidak seorangpun memiliki hak untuk menghukum mereka, teroris mempunyai hak untuk melakukan serangan, negara dan masyarakat tidak punya hak untuk melindungi dirinya. Mereka mengklaim bahwa teroris yang terbunuh atau tertangkap adalah martir. Banyak kelompok teroris yang menuntut perlakuan sebagai tawanan perang, tetapi mereka menolak hak negara untuk mengajukannya ke depan pengadilan sebagai penjahat perang karena melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil secara acak. Teroris abad ke-20 berargumen bahwa hanya mereka yang mengetahui kebenaran dan karena itulah hukum yang biasa tidak berlaku untuk mereka.

Namun demikian, Charles A. Russell dan Bowman H. Miller (1977), melakukan suatu studi tentang karakteristik terorisme dengan meelakukan analisa data biografi dan sosial 250 orang anggota teroris Jerman baik sayap kiri maupun sayap kanan. Russel dan Bowman juga berusaha menarik suatu kesimpulan gambaran sosiologis atau profil teroris perkotaan modern dengan mengkompilasikan dan menganalisa lebih dari 350 individu kader dan pimpinan kelompok teroris dari Argentina, Brazil, Jerman, Iran, Irlandia, Italia, Jepang, Palestina, Spanyol, Turki, dan Uruguay, yang aktif selama periodetahun 1966 sampai 1976 yaitu periode dekade awal era teroris kontemporer. Russell dan Bowman menyimpulkan bahwa (Hudson; 1999: 46):

In summation, one can draw a general composite picture into which fit the great majority of those terrorists from the eighteen urban guerrilla groups

examined here. To this point, they have been largely single males aged 22 to 24...who have some university education, if not a college degree. The female terrorists, except for the West German groups and an occasional leading figure in the JRA and PFLP, are preoccupied with support rather than operational roles....Whether having turned to terrorism as a university student or only later, most were provided an anarchist or Marxist world view, as well as recruited into terrorist operations while in the university.

Jadi menurut Russel dan Bowman, mayoritas pelaku teroris adalah laki-laki singel yang berusia 22 sampai dengan 24 tahun yang sebagian berpendidikan universitas (pendidikan tinggi) atau setidaknya setingkat akademi. Temuan berikutnya adalah teroris berjenis kelamin perempuan, kecuali pada kelompok Jerman Barat dan beberapa figur pemimpin JRA dan PFLP, cenderung berperan dalam kelompok teroris sebagai pendukung operasi dibandingkan dalam operasi lapangan. Menurut Russel dan Bowman meskipun para pelaku menjadi teroris pada saat menjadi mahasiswa atau setelahnya, sebagian besar dari mereka telah dipengaruhi dengan pandangan anarkis atau marxis.

Namun menurut Hudson (1999), profil teroris yang dibuat oleh Russell dan Miller cenderung hanya melihat karakteristik sosiologis pelaku teroris pada tahun 1970-an yang diberitakan secara luas, misalnya temuan bahwa sebagian teroris adalah kaum muda. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar profil yang dibuat oleh Russel dan Miller bersifat definitif karena hanya mengandalkan pada sumber data sekunder, yaitu artikel surat kabar dan studi akademik. Selain itu pendekatan metode mereka, menurut Hudson, terdapat kendala validitas. Menurut Hudson ada suatu asumsi yang tidak tepat, misalnya, kesimpulan Russel dan Miller seperti dikutip diatas tidaklah tepat untuk menggambarkan sebagian besar anggota kelompok teroris yang beroperasi pada tahun 1990-an. Menurut Hudson, sebagian besar anggota kelompok teroris Amerika Latin seperti FARC dan Shining Path, kelompok teroris Timur Tengah seperti Armed Islamic Group (*Group Islamique Armé* – GIA), Hamas, and Hizballah, kelompok teroris Asia seperti LTTE, dan kelompok teroris Irlandia seperti IRA tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi bahkan tidak terdidik. Namun demikian menurut Hudson profil yang dibuat oleh Russel dan Miller dapat tetap digunakan sebagai

pedoman dasar untuk membuat sejumlah generalisasi mengenai karakteristik pribadi pelaku teroris dengan mengombinasikannya dengan informasi lain.

Edgar O'Ballance (1979), juga mengajukan pendapat tentang karakteristik yang penting bagi teroris yang "berhasil". Menurut O'Ballance, teroris yang "berhasil" memiliki ciri: berdedikasi, termasuk kepatuhan mutlak pada pemimpin gerakan, memiliki keberanian, tidak memiliki belas kasihan atau penyesalan mendalam meskipun korbannya adalah orang-orang (baik laki-laki maupun perempuan) dan anak-anak yang tidak bersalah, biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, karena teroris harus mengumpulkan dan menganalisa berbagai informasi dan menjalankan perencanaan yang rumit serta menghindari satuan kepolisian atau keamanan, memiliki standar kemewahan yang tinggi, dalam hal agar dapat masuk dalam penerbangan kelas utama, tinggal di hotel mewah, dan bersosialisasi dengan kelompok eksekutif internasional, dan karena itu sangatlah beralasan jika mereka memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau terdidik dengan baik dan memiliki keinginan untuk berpendidikan lebih tinggi, selain itu mereka haruslah mampu berbahasa Inggris sebagai bahasa yang banyak digunakan di dunia.

Pendapat ini benar, namun demikian tidak kesemua persyaratan tersebut diperlukan oleh organisasi gerilya atau teroris yang besar di negara yang belum maju. FARC, PKK, LTTE, dan kelompok teroris Arab memiliki banyak anggota yang berusia muda, dan berasal dari kelas bawah kecuali beberapa pimpinan kelompoknya.

Begitu pula dengan latar belakang keluarga dan keyakinan, tidak ada suatu pola yang jelas. Beberapa teroris Jerman tumbuh dalam keluarga yang tanpa kehadiran bapak, membenci bapaknya, atau anak dari orang tua yang telah bercerai. Tetapi teroris Jerman lainnya hidup dalam suatu keluarga yang akrab. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teroris ekstrem kanan mengalami auto-destruktif yang sering, mempercayai tahayul, dan menunjukkan ciri "*authoritarian personality*". Hasil penelitian juga menemukan bahwa ideologi kurang berperan diantara teroris ekstrem kanan. Secara sederhana penelitian ini

menyimpulkan bahwa teroris berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah dan kurang diterima.

2.1.3. Ideologisasi Jihad

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari idea dan logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Idea dalam Webster's New Colligate Dictionary berarti "*something existing in the mind as the result of the formulation on an opinion, plan or like*" (sesuatu yang ada dalam pikiran atau rencana). Sedangkan logis berasal dari kata logos yang berarti *word*. Kata logos sendiri ini berasal dari kata *legein* yang berarti *science* atau pengetahuan atau teori. Jadi ideologi menurut kata adalah pencakupan dari yang terlihat atau mengutarakan apa yang terumus dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.

Istilah Ideologi pertama kali digunakan oleh A.I.C. Destutt de Tracy, seorang filsuf Perancis dalam bukunya berjudul: *Elements d'ideologie*. Karl Marx kemudian mengembangkan pengertian ideologi ini, dalam bukunya yang berjudul *Die Deutsche Ideologie*, Marx mendefinisikan ideologi sebagai "keseluruhan nilai dan pandangan yang dengannya kelas yang berkuasa membenarkan kekuasaan mereka sendiri". Selain definisi dari Marx, Karl Mannheim dalam bukunya yang berjudul: *Ideology and Utopia* (1936) mendefinisikan ideologi sebagai "suatu keseluruhan ide-ide dan kognisi-kognisi yang ditujukan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada". (Yewanggoe; 2009: 8)

Salah seorang pakar mengenai Ideologi, Edward Shills, secara tegas menyebutkan bahwa *ideology* adalah *a system of ideas* (Shills; 1972: 66-67) Dengan pemahaman seperti ini, maka secara harafiah Ideologi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian ide yang telah dipadu menjadi satu. Menurut Antonio Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi 'mengatur' manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya. (Simon; 1999: 83). Sementara itu Frans Magnis Suseno, menegaskan bahwa ideologi merupakan keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan,

kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. (Suseno; 1992: 230). Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut.

Secara umum ideologisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam sebuah komunitas/kelompok masyarakat untuk mengajak/menurunkan nilai-nilai ideal yang diyakini kepada masyarakat yang lebih luas atau generasi penerusnya dengan tujuan untuk menjadikan nilai-nilai ideal tersebut sebagai sebuah pegangan dan bahkan pedoman hidup. Sementara itu, *Jihad* sendiri berasal dari kata “jahada” yang artinya bekerja keras atau berjuang secara sungguh-sungguh. Jadi Ideologisasi Jihad adalah proses yang dilakukan dalam sebuah komunitas/kelompok masyarakat untuk mengajak/menurunkan nilai-nilai ideal yang diyakini kepada masyarakat yang lebih luas atau generasi penerusnya dengan tujuan untuk menjadikan nilai-nilai ideal *Jihad* sebagai sebuah pegangan dan bahkan pedoman hidup. Jihad dikatakan menjadi di- ideologisasi, Karena istilah *Jihad* tersebut bagi kalangan tertentu yang merespon Barat secara radikal, digunakan sebagai satu-satunya cara untuk melawannya adalah mengobarkan jihad. Oleh karena itu, mereka mengembangkan sendiri tafsiran jihad, yang sama sekali berbeda dengan makna sebenarnya dari jihad itu.

2.1.3.1. Qutbism: Dasar Praktek Terorisme Berbasis Islam

Qutbism (juga disebut Kotebism, Qutbiyya, atau Qutbiyyah) adalah sempalan ideologi dan aktivisme IslamSunni, berdasarkan pemikiran dan tulisan-tulisan Sayyid Quthb, seorang pemikir Islam yang mantang anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin yang dieksekusi tahun 1966. Qutbism mengajukan konsep “*Jihad* ofensif,” yaitu melancarkan jihad penaklukan (Farah; 2007) –atau mengedepankan “jihad bersenjata”. Qutbism telah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ekstremis Jihad seperti Osama bin Laden yang berulang-ulang

mengutip pemikiran Sayyid Quthb dan menganggap dirinya sebagai keturunan intelektualnya. (Eikmeir; 2007)

Ideologi utama dibalik terorisme atas nama Islam adalah prinsip jihad, atau perjuangan, yang merupakan landasan utama Islam. Jihad menganjurkan peperangan melawan non-muslim dan orang-orang murtad. Menurut salah seorang pakar terorisme Dale C. Eikmeier, ideologi, dari pada individual atau kelompok, adalah pusat kegawatan Al-Qaeda dan kelompok sejenis, dan ideologi yang mendasari tersebut adalah “kumpulan pemikiran Islam yang ganas yang bernama Qutbism”. Dalam tulisannya, ia memaparkan prinsip-prinsip Qutbism yang diantaranya adalah:

1. Kepercayaan bahwa muslim telah sesat dari Islam yang sebenar-benarnya dan harus dikembalikan ke “Islam murni” sebagaimana yang dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW.
2. Jalan menuju ke “Islam murni” hanya melalui interpretasi Qur’an dan Hadist secara ketat dan harfiah, bersamaan dengan pelaksanaan dari perintah Nabi.
3. Muslim harus menerjemahkan sumber asli sendiri tanpa terikat oleh interpretasi dari sarjana muslim.
4. Bahwa interpretasi Al-Qur’an dari sejarah dan perspektif kontekstual adalah kebusukan, dan bahwa mayoritas sejarah islam dan tradisi yurisprudensi klasik adalah tak lebih dari kesesatan belaka.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pemikiran Berger Tentang Agama

Peter Berger dalam bukunya yang berjudul *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, berusaha menjelaskan agama secara sosiologis.

2.2.1.1. Agama dan Konstruksi Dunia

Berger mengawali penafsirannya tentang agama dengan mengamati bahwa sedikit sekali kehidupan manusia yang ditentukan oleh instingnya. Karena manusia memiliki periode kehamilan relatif singkat di dalam rahim (dibandingkan dengan spesies lain), manusia tidak memiliki waktu untuk mengembangkan

peralatan insting yang sangat rumit. Manusia memiliki naluri sangat sedikit, dan itupun cukup lemah. Jadi manusia memiliki beberapa tanggapan yang spesifik terhadap rangsangan tertentu yang “berpola”. Hal ini berarti bahwa dalam setiap situasi manusia memiliki rentang pilihan yang sangat lebar untuk merespon. Manusia terus-menerus dipaksa untuk memilih cara berinteraksi dengan dunianya.

Dalam terminologi Berger, manusia harus memilih bagaimana “mengeksternalisasi” dirinya, sendiri, yang artinya bagaimana berhubungan dan membentuk lingkungan di sekitarnya. (Berger mengklaim bahwa dalam hal ini manusia berbeda dari semua spesies hewan lainnya. Berger mungkin salah tentang spesies hewan lainnya; mungkin ada hewan lain yang memiliki banyak kemiripan dengan manusia. Tetapi hal itu tidak berarti Berger salah tentang kehidupan manusia). Setiap kali kita mengeksternalisasi diri kita, kita mengubah lingkungan, yang menciptakan seperangkat pilihan baru yang harus dihadapi. Karena hubungan antara dirinya dan dunia selalu berubah, manusia selalu berada dalam “ketidakseimbangan” (*off balance*). Manusia selalu menginginkan lebih banyak, menurut pandangan sosiologis, agar dapat seimbang – untuk manusia harus memiliki keteraturan yang permanen stabil dalam hidupnya, sehingga manusia dapat memprediksi baik lingkungan maupun dan tanggapannya untuk itu manusia dan manusia lain disekitarnya harus membuat pilihan. Tujuan utama masyarakat adalah untuk menciptakan keteraturan yang yang dapat diprediksi secara stabil dan untuk membuat semua manusia meyakinkannya, meskipun, walaupun sebenarnya hal itu selalumerupakan ilusi palsu. Masyarakat melakukan hal ini dengan “*objectivating*”, yang berarti mengajarkan kepada kita (terutama ketika masa anak-anak) untuk membuat pilihan yang sama berulang-ulang seperti kita mengeksternalisasi diri kita sendiri. Lebih penting lagi, masyarakat menginginkan kita untuk percaya bahwa pilihan-pilihan tersebut bukanlah benar-benar pilihan. Masyarakat menginginkan kita untuk bertindak seperti yang masyarakat inginkan, seolah-olah masyarakat adalah merupakan kenyataan obyektif yang berada di diluar kemampuan kita untuk mengubahnya. Misalnya, kita mengajarkan pada anak-anak untuk menggunakan tangan kanan untuk menerima pemberian dari orang lain, padahal ada kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu menggunakan tangan kanan untuk menerima pemberian. Tapi kita menginginkan

anak kita untuk percaya bahwa mereka harus menggunakan tangan kanannya, seolah-olah itu adalah suatu kenyataan obyektif. Masyarakat juga ingin kita percaya bahwa peran-peran tertentu yang kita mainkan dalam kehidupan (misalnya, anak, mahasiswa, pasangan suami-istri, pegawai, dll) bukanlah sesuatu yang dipaksakan, dan peran-peran tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus. Proses pembelajaran peran ini disebut “sosialisasi”. Agar sosialisasi dapat bekerja secara efektif, kita juga harus merasa bahwa identitas diri kita tergantung pada bagaimana kita memainkan peran tersebut. Dalam istilah Berger, kita harus “menginternalisasi” realitas obyektif yang telah dilekatkan oleh masyarakat. Kita harus merasa bahwa nilai dalam diri kita, batin kita tentang “kebenaran”, tergantung pada kesesuaian dengan cara masyarakat melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kita harus merasa tidak hanya keliru tetapi bersalah atau bahkan berdosa atau merasa “buruk” jika kita makan dengan menggunakan tangan kiri. Berger menggunakan istilah NOMOS untuk menyebutkan semua pola-pola obyektivasi dalam masyarakat tertentu yang diinternalisasikan pada individu. Nomos terdiri dari cara pandang masyarakat terhadap dunianya (worldview = semua pengetahuan tentang sebenarnya hal tersebut) dan etosnya (semua nilai-nilai dan cara hidup). Nomos adalah merupakan hasil dari rangkaian panjang pilihan yang pernah dibuat manusia. Dimana pilihan-pilihan tersebut dibuat dalam hal yang berbeda-beda. Tetapi masyarakat, melalui proses sosialisasi, berharap dapat mempengaruhi individu bahwa nomos tersebut secara obyektif benar dan karena itu tak berubah. Masyarakat menginginkan nomos dilakukan tanpa keraguan sebanyak mungkin. Masyarakat biasanya cukup berhasil dalam hal ini, karena manusia dilahirkan dengan pola insting yang lemah, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi untuk waktu yang lama kita bergantung pada orang tua dan para tetua lainnya untuk mengajar kita bagaimana menanggapi rangsangan dunia. Kita biasanya harus mempercayai mereka dan melakukan sesuatu sesuai dengan cara mereka melakukannya. Tetapi setiap individu tetap sadar (meskipun tanpa disadari) bahwa pada tingkatan kebebasan bertindak tertentu berdiri sendiri dan bertentangan dengan nomos, ketika individu, seperti halnya lingkungannya yang selalu berubah, nomos secara inheren menjadi tidak stabil. Apalagi individu kerap kali bertemu orang lain yang memiliki nomos agak berbeda, sehingga

kebenaran yang diberikan setiap nomos menjadi tampaknya tidak terlalu subyektif. Realitas objektif dan keamanan dari nomos secara khusus menjadi dipertanyakan ketika menghadapi pengalamanyang tidak biasa - misalnya, mimpi, saat-saat kegilaan, atau menghadapi kematian. Apa pun yang mengancam untuk merusak nomos meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan berakhir tanpa nomos. Berger menyebut kondisi menjadi tanpa nomos ini sebagai “anomy”, karena anomy ini selalua ada kemungkinan untuk terjadi, masyarakat selalu ingin memperkuat nomos sekuat mungkin . disinilah agama mulai terlihat wujudnya. Agama didasarkan pada klaim bahwa nomos tertentu dari suatu masyarakat adalah salah satu diantara berbagai kemungkinan pilihan. Sebaliknya, agama mengklaim bahwa nomos ini berakar pada kosmos (alam semesta) itu sendiri, karena nomos adalah bayangan cermin dari sifat alamiah atau pola kosmos, menurut klaim agama, karena kosmos adalah sesuatu yang kekal, maka nomos juga kekal. Agama mendukung klaim tersebut dengan menyediakan simbol-simbol yang memberikan gambaran rinci tentang bagaimana nomos tersebut berakar dari kosmos. Simbol-simbol ini kemudian diisi khusus dengan kekuatan “suci”. Kekuatan ini yang seharusnya menjadi kekuatan yang melandasi realitas kosmik. Kekuatan ini mengancam mereka yang melanggar sifat alami realitas dengan azab, sementara itu juga memberikan pahala bagi mereka yang mengikuti realitas. “Realitas” dalam pengertian ini berarti pola dari nomos, yang merupakan cerminan dari kosmos. Ancaman terbesarnya adalah hilangnya nomos tersebut dan masuk kedalam kekacauan anomi. Simbol agama tampak begitu kuat karena agama menyatakan nilai yang paling penting dalam kehidupan, perasaan bahwa realitas adalah suatu ketertiban yang bermakna, bukan kekacauan acak. Jadi agama berharap untuk mempengaruhi pengikutnya bahwa alam semesta, dan individu maupun kelompok yang hidup di alam semesta, semuanya berdasarkan satu pola kesatuan dan ketertiban.

2.2.1.2. Agama dan Mempertahankan Dunia

Setiap nomos secara inheren sulit dan tidak pasti, yang membuat kehidupan manusiasebagai suatu masalah yang cukup menakutkan. Jadi setiap masyarakat mencoba untuk meyakinkan anggotanya dengan mempertahankan dunia dalam beberapa tatanan yang permanen. Namun hal ini tidaklah mungkin.

Tetapi yang paling mungkin adalah membuat orang percaya bahwa dunianya benar-benar permanen. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan meyakinkan setiap orang bahwa nomos seperti yang ada saat ini sebaiknya dan harus sama seperti sebelumnya – tidak perlu ada pilihan alternatif lain. Hal ini disebut sebagai “melegitimasi” nomos. Semua pengetahuan melegitimasi nomos. Segala sesuatu yang melalui “pengetahuan objektif” sebenarnya adalah merupakan interpretasi dari realitas. Jadi jika jika setiap orang meyakini bahwa sesuatu itu benar, serta tidak ada interpretasi alternatif yang akan dipertimbangkan, maka nomos akan menjadi stabil dan sah. Contohnya, pada suatu masa semua orang “tahu” bahwa perbudakan adalah sesuatu yang tak terelakkan dan dapat diterima, atau anak-anak boleh dipukuli. Selama pandangan ini dianggap benar secara obyektif, nomos yang berdasarkan hal tersebut tampak cukup sah.

Sebelum zaman modern, agama adalah merupakan kekuatan terkuat untuk legitimasi nomos. Agama melakukan tugasnya dalam beberapa cara. Salah satu cara adalah dengan mengklaim bahwa kehidupan manusia (mikrokosmos) adalah merupakan cerminan dari alam semesta (makrokosmos). Misalnya, beberapa masyarakat “tahu” (percaya) bahwa struktur politik mereka adalah cerminan hubungan hirarkis antara para dewa atau kekuatan alam. Cara lain untuk melegitimasi nomos adalah dengan mengatakan bahwa pikiran dan perilaku kita telah diatur oleh kehendak Tuhan, atau bahwa mereka mengikuti beberapa kekuatan kosmik yang impersonal (Roh Agung, Tao, Buddha, Alam, Logos, dll)

Bila legitimasi ini bekerja dengan baik, manusia dianggap berpengetahuan yang benar secara obyektif mengenai dunia. Cara yang sama juga melegitimasi peran individu. Jadi, misalnya orang bersedia membayar pajak kepada pemerintah karena mereka “tahu” bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk membayar pajak. Manusia lainnya mungkin “tahu” bahwa mereka meniru apa yang dilakukan oleh para dewa di langit (dalam beberapa mitos para dewa membayar pajak pada pemerintah di alamnya). Tentu saja ini membantu untuk mempertahankan pola-pola perilaku sosial agar tidak berubah. Tetapi juga membuat individu merasa menjadi bagian penting dari kosmos. Jadi perilaku dan pengalaman biasa diambil menjadi sesuatu yang bermakna luar biasa (inilah sebabnya mengapa orang tua

mengatakan hal-hal seperti, “Tuhan mengasihi anak-anak yang patuh pada orang tuanya). Untuk memperkuat rasa arti yang luar biasa, agama mengubah perilaku biasa menjadi ritual. Setiap nomos selalu berada dalam keadaan genting karena sebagian orang merasa memiliki kebebasan, bahkan seringkali cenderung untuk “lupa” bagaimana mereka seharusnya berpikir dan bertindak. Sebuah ritual akan “mengingatkan” individu tentang cara hidup yang “benar” dan memaknai “kebenaran”. Ritual memperkuat pengetahuan obyektif yang melegitimasi nomos. Ritual menciptakan rasa bahwa ada suatu struktur yang tak tergoyahkan yang menentukan pola kehidupan sehari-hari. Pada umumnya ritual tidak dibuat oleh para pemimpin yang kuat yang mampu memaksakannya pada orang lain (walaupun ini kadang-kadang terjadi). Sebaliknya, kebanyakan ritual muncul dari orang-orang biasa dengan kecenderungan yang biasa untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, karena kebiasaan. Jadi proses yang sama dari pengulangan yang menciptakan nomos pertama kali juga menciptakan ritual yang melegitimasi nomos. Agama juga harus memberi makna dengan pengalaman luar biasa seperti mimpi, ekstasi, perang, pertemuan dengan orang asing, dll.

Orang-orang tersebut mungkin menunjukkan bahwa dunia terbuka untuk interpretasi alternatif. Hal ini meningkatkan kemungkinan perubahan dalam nomos, yang dapat membuat ancaman kekacauan dan anomy. Apa yang agama dapat lakukan dalam kasus ini adalah dengan menyangkal bahwa ada hal-hal lainnya yang diluar ketertiban nomos. Agama melakukan ini dengan memberikan “pengetahuan” yang “menjelaskan” peristiwa luar biasa dalam ketertiban biasa. Sehingga, menegaskan bahwa tidak ada ancaman bagi ketertiban, karena tidak ada sesuatu di luar ketertiban yang benar-benar ada.

Setiap agama, dan setiap jenis pengetahuan, harus dipelihara oleh sekelompok orang tertentu. Jika pengetahuan tersebut akan diterima sebagai suatu kebenaran, kelompok-kelompok yang mempertahankannya harus juga melakukan sikap sebagai yang baik dan benar. Kita cenderung percaya ajaran agama jika kita melihat ulama sebagai yang baik dan benar. Sekelompok orang yang mempertahankan suatu pengetahuan, dengan lembaga-lembaga yang mereka telah mereka ciptakan, disebut sebagai “*plausibility structure*”. Nomos akan tampak masuk akal (*plausible*) asalkan didukung oleh suatu *plausibility structure* yang

kuat. Karena masyarakat ingin mempertahankan nomos, maka masyarakat akan berusaha untuk menafikan atau menghancurkan setiap nomos alternatif.

Secara emosional sebagian besar dari kita menilai nomos berdasarkan *plausibility structure*-nya, karena mereka adalah orang-orang yang mewakili perwujudan nomos dalam masyarakat. Ketika *plausibility structure* dipertanyakan, hal ini dapat memiliki dua efek yang berlawanan, yaitu dapat membangkitkan desakan yang kuat pada nilai-nilai tradisional atau perubahan dalam *plausibility structure* yang akan membangkitkan perubahan nomos. Tetapi proses sebaliknya juga terjadi: perubahan dalam nomos dapat menghasilkan perubahan dalam *plausibility structure*. Jadi ada hubungan dialektik antara nomos dan *plausibility structure*: masing-masing saling mempengaruhi yang lain.

2.2.1.3. Masalah Teodisy

Dalam rangka melegitimasi nomos, masyarakat harus menyangkal bahwa ada sesuatu yang inheren kacau atau tak terduga di dunia. Kita semua tahu bahwa dunia secara inheren kacau karena kita harus menghadapi kematian kita sendiri dan orang yang kita cintai, dan hari kematian benar-benar tidak terduga. Kematian adalah ancaman utama yang harus dihadapi oleh semua masyarakat, dan sebagian besar masyarakat menggunakan agama untuk membuat kematian menjadi sesuatu jalan yang dapat berguna. Menurut Berger: *“The power of religion depends, in the last resort, upon the credibility of the banners it puts in the hands of men as they stand before death, or, more accurately, as they walk, inevitably, toward it.”* (“Kekuatan agama tergantung pada perhentian terakhir, yaitu pada kredibilitas yang diletakkan ditangan setiap manusia sesuai dengan kehidupannya sebelum mati, atau lebih tepatnya bagaimana mereka menjalani kehidupan, karena manusia pasti akan menuju kematian.”)

Masalah utama yang muncul karena kematian dan bentuk kekacauan lainnya bukanlah penderitaan secara fisik. Kita dapat menanggung segala macam penderitaan tersebut selama penderitaan itu memiliki arti – sepanjang penderitaan tersebut masuk akal bagi kita. Rasa sakit yang tak tertahankan berasal penderitaan yang tanpa makna: penderitaan yang tidak bisa dijelaskan dalam tatanan sosial. Penderitaan inilah yang kita maksud dengan *“evil”* (“jahat”). Jadi tugas penting

bagi setiap nomos adalah memberikan penjelasan bagi apa yang tampaknya merupakan kejahatan. Penjelasan inilah yang disebut oleh Berger sebagai “teodisi” (secara harfiah, kata teodisi berarti membenarkan jalan Tuhan, tetapi bagi Berger teodisi berarti membenarkan nomos). Untuk dapat menerima alasan apapun atas penderitaan, ketidaktertiban, dan kejahatan, kita harus menerima seluruh nomos. Teodisi selalu mengklaim bahwa ketidakteraturan itu tidak benar-benar ada – yang entah bagaimana semuanya telah direncanakan dalam sebuah skema besar. Jika anak meninggal dunia, misalnya, orang dapat mengatakan bahwa Tuhan memanggilnya pulang, atau menguji iman orang tua’, atau mungkin itu adalah karma sang anak. Dalam teodisi, nomos membuat masuk akal ancaman-ancaman yang tidak masuk akal, selama seseorang menerima klaim bahwa nomos adalah sesuatu yang telah ditentukan, berlaku bagi semua, dan kekal. Jadi harga yang dibayar oleh tiap individu adalah penghiburan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kenyataan yang lebih besar (nomos), dan harus melebur kedalamnya. Hal ini tidak menghapuskan penderitaan. Tetapi membuat penderitaan dapat merasa tertahankan, benar, atau bahkan mulia. Hal itu juga berarti membuat penderitaan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Berger menyebut ini sebagai sebuah sikap “masokis”, karena penderitaan tersebut benar-benar dirasakan nikmat (atau setidaknya lebih baik) untuk menyerahkan dirinya pada realitas yang lebih besar (Tuhan, kosmos, Roh Agung, dll) daripada berdiri sendiri dan harus menghadapi rasa sakit tanpa penjelasan yang bermakna. Seorang masokis akan mengatakan bahwa pada dasarnya “dirinya bukanlah apa-apa”.

Tuhan – atau realitas kosmik, atau nomos – adalah segalanya. Dengan meyakini hal ini, seseorang merasa yakin bahwa struktur yang telah memberi arti pada kehidupan adalah sesuatu yang permanen dan teguh. Hal ini memberikan kepastian lebih daripada sekedar kompensasi untuk apapun yang membuat penderitaan dapat tertanggung. Semakin kita menderita, semakin besar kesempatan kita untuk menegaskan kembali kepercayaan kita terhadap nomos dan kosmos. Jadi orang yang religius dapat benar-benar mencari kesulitan untuk memiliki lebih banyak kesempatan untuk melegitimasi iman mereka baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Sama halnya dengan warga negara yang patriotik yang bisa menerima atau bahkan mencari kesempatan untuk

menderita bahkan mati untuk negaranya, yaitu untuk nomos mereka. Dalam pandangan Berger, motivasi utama kita untuk semua yang kita lakukan adalah untuk menjaga ilusi yang kita miliki bersama-sama dalam suatu masyarakat – ilusi bahwa nomos kita bersifat universal dan abadi, yaitu jalan yang memang sudah seharusnya dijalani, dan karena itulah cara yang kita lakukan saat ini bukanlah cara yang paling baik, kecuali cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Selama kita dapat mempertahankan ilusi ini, kita merasa bahwa hidup ini bermakna. Oleh karena itu kita akan melakukan hal yang paling ekstrim, dan mungkin merusak diri sendiri, agar tetap yakin akan kebenaran nomos kita.

2.2.2. **Bunuh Diri: Antara Kategori Durkheim dan Jihad**

Karya besar Durkheim lainnya yang sangat berperan dalam penjelasan kriminologis adalah tentang hubungan antara solidaritas sosial dan gejala bunuh diri. Durkheim mendefinisikan ‘bunuh diri’ sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia dan dilakukannya secara sengaja.

Telaah tentang bunuh diri sendiri bukan hal yang baru pada masa Durkheim melakukan studinya. Pada masa itu ada dua tafsiran yang umum dikenal tentang penyebab bunuh diri yaitu tafsir gangguan psikologis, biologis, dan tafsir ekologis.

Tafsir gangguan psikologis melihat bunuh diri sebagai gejala individual yang terjadi karena pelakunya menderita gangguan mental – yang dapat digolongkan ke dalam empat tipe utama gangguan mental. Tipe-tipe bunuh diri secara psikologis adalah *manical suicide* (yaitu bunuh diri yang disebabkan oleh halusinasi – baik untuk menghindari atau menuruti ‘perintah’ yang dianggapnya nyata); *melancholy suicide* (yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan depresi berat dan kesedihan yang berlebihan-lebihan); *obsessive suicide* (kasus-kasus bunuh diri yang tidak dilandaskan pada motivasi tertentu – baik yang nyata maupun yang imajiner – tetapi dilandaskan semata-mata pada gagasan tentang kematian yang begitu kuat tertanam dan menguasai pikiran pelakunya. Pelakunya sedemikian dikuasai oleh keinginan untuk membunuh diri sendiri, walau disadarinya sesungguhnya tidak ada motivasi yang

masuk akal untuk *automatic suicide* (yakni tindakan bunuh diri yang semata-mata dilandaskan pada dorongan impulsif).

Tafsir psikologis ini, menurut Durkheim sulit dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak semua tindakan bunuh diri dilakukan oleh para penderita gangguan psikologis. Ditambahkannya, data yang digunakan untuk menarik generalisasi bahwa bunuh diri merupakan akibat berbagai faktor psikologis begitu terbatas hingga kesimpulan yang ditarik pun bersifat over – generalisation. Selain itu, keraguan Durkheim terjadi karena,. Berdasarkan data statistik yang dihimpunya, terlihat adanya keteraturan hubungan di antara bunuh diri dengan beberapa ciri sosial kultural. Beberapa ciri termaksud adalah jenis kelamin, agama, usia, dan asal negara pelaku bunuh diri. Peningkatan angka bunuh diri secara teratur dalam satuan abad juga menambah keraguan Durkheim. Singkatnya, bunuh diri itu lebih dari sekedar hasil kerja faktor-faktor psikologis.

Sama halnya seperti tafsir psikologis, Durkheim juga menolak penjelasan biologis – bahwa ada hubungan di antara bunuh diri dengan ras dan asal usul keturunan pelakunya. Dikatakannya, kelemahan tafsir ini bukan hanya karena ketidak-jelasan definisi ‘ras’ yang digunakan, tetapi juga karena ada faktor-faktor non-biologis yang perlu diperhitungkan dalam menilai penyebab bunuh diri. Data-data statistik yang dikumpulkan Durkheim menopang kecurigaan termaksud.

Hasil tafsir ekologis/ kosmis, yang merupakan salah satu tafsir dominan pada masa itu, juga tidak memuaskan Durkheim. Berdasarkan data statistik, tidak terlihat adanya keteraturan gejala bunuh diri menurut variabel-variabel ekologis seperti iklim, suhu dan kelembaban udara – baik di Eropa maupun di tempat lain.

Berangkat dari ketidak-puasan atas penjelasan-penjelasan yang ada, Durkheim mencoba menjelaskan penyebab bunuh diri secara sosiologis. Namun, tidak semua proposisi dasar penjelasan yang ada disanggahnya. Dalam batas-batas tertentu, ada yang diterimanya. Misalnya ia mengakui kebenaran pandangan bahwa bunuh diri bukan merupakan gejala yang lepas dari gejala lainnya. Yang membedakan pandangan Durkheim dari pandangan-pandangan di atas adalah pengakuannya bahwa, walau bunuh diri merupakan tindakan individual, keseluruhan tindakan ini – dimanifestasikan dalam tingkat bunuh diri – tidak

dapat dipandang sebagai semata-mata penjumlahan tindakan individual. Lebih dari itu, bunuh diri pada dasarnya merupakan gejala sosial yang terjadi di dalam kolektivitas, merupakan fakta sosial – fakta *sui generis* dengan keutuhan, individualitas dan sifat-sifat dasarnya sendiri.

Berangkat dari asumsi dasar bahwa bunuh diri merupakan gejala kolektivitas inilah Durkheim melakukan telaah sosiologisnya untuk mencari penyebab bunuh diri. Dan dia menemukan beberapa tipe utama bunuh diri, yakni :

(1) **Egoistic suicide** – yaitu bunuh diri yang terjadi karena rendahnya tingkat integrasi suatu kolektivitas. Menurut Durkheim, tingkat integrasi yang rendah ‘memaksa’ anggota-anggotanya untuk bersandar pada diri masing-masing dalam pengambilan keputusan untuk berkelakuan. Hal ini berbeda dengan keadaan di kolektivitas dengan tingkat integrasi yang tinggi, kolektivitas yang kohesif: Dalam kolektivitas dengan tingkat integrasi yang rendah, orang tidak dilindungi dari tindakan bunuh diri. Dalam menghadapi persoalan, diri sendirilah yang dituntut untuk memecahkannya, tanpa jaminan akan bantuan dari orang-orang lain di dalam kolektivitasnya.

(2) **Altruistic suicide**. Tipe bunuh diri ini tidak terjadi karena integrasi sosial yang lemah dalam kolektivitas, tetapi justru karena integrasi sosial yang kokoh (atau dengan kata lain, karena kurang individuasi, individu hampir terabsorpsi oleh masyarakat secara menyeluruh).

Secara khusus ada tiga tipe utama bunuh diri altruistik; yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : (Durkheim. 1950:217-21):

a) **Obligatory altruistic suicide**– yaitu bunuh diri yang dilakukan seseorang bukan karena hal ini merupakan haknya, tetapi karena kewajibannya. Kalau orang yang bersangkutan gagal melaksanakan kewajiban ini, ia akan kehilangan kehormatannya dan juga mendapat sanksi yang biasanya bersifat keagamaan.

Bunuh diri tipe ini terlibat dalam kasus-kasus di masyarakat-masyarakat tertentu yang menghendaki orang lanjut usia atau sakit parah untuk melakukan tindakan bunuh diri. Selain itu juga terlihat dalam hal janda yang melakukan bunuh diri bersamaan dengan kematian suaminya (di

India) dan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh pelayan atau pengikut raja atau pimpinan yang meninggal.

b) Optional altruistic suicide – yaitu kategori bunuh diri yang terbentuk dari kasus-kasus bunuh diri yang terjadi bukan atas dasar kewajiban (yang bersifat memaksa) yang ditetapkan secara eksplisit oleh masyarakat tetapi atas dasar dukungan masyarakat. Maksudnya, penghargaan dan kehormatan akan diperoleh oleh mereka yang rela melakukan tindakan bunuh diri. Contohnya adalah para prajurit Jepang yang bersedia melakukan bunuh diri untuk membela pimpinannya) Soal eksplisitas tuntutan masyarakat kepada warganya untuk melakukan bunuh diri inilah yang menjadi pembela sub-tipe bunuh diri altruistik pertama dengan sub-tipe kedua.

c) Acute altruistic suicide atau mystical suicide -- bunuh diri dalam tipe ini bukan terjadi karena adanya unsur kewajiban/ paksaan, dan bukan juga karena didorong oleh keinginan pelakunya untuk mendapatkan kehormatan. Kasus-kasus bunuh diri sendiri terdapat, antara lain,. Di India (di kalangan para Brahma) dan juga di suku-suku tertentu di Jepang. Bentuknya, misalnya menjatuhkan diri ke dalam gunung berapi dalam suatu upacara keagamaan – sementara warga lainnya menontonnya. Semua sub-tipe bunuh diri altruistik di atas merupakan gejala yang biasa dijumpai di masyarakat yang disebut Durkheim sebagai ‘lower society’. Namun, lanjutnya, ia pun dapat ditemukan di ‘more recent civilization’ – khususnya di kalangan penganut agama Kristen (kasus-kasus martir kristiani) dan militer.

Dalam dunia kemiliteran, Durkheim mendapatkan adanya perbedaan tingkat bunuh diri yang terjadi sejalan dengan perbedaan lama kedinasan, kepangkatan dan kesukarelaan memasuki dunia kemiliteran.

Berdasarkan analisis statistik yang dilakukannya, secara khusus ia menemukan bahwa:

a. tingkat bunuh diri di kalangan perwira lebih tinggi yang bersama-dinas lama,

- b. tingkat bunuh diri di kalangan perwira lebih tinggi daripada di kalangan prajurit, dan
- c. tingkat bunuh diri di kalangan tentara yang memasuki dinas kemiliteran secara sukarela lebih tinggi.

Terhadap temuan-temuan ini, penjelasannya adalah berpangkal pada pandangan Durkheim bahwa semakin lama masa dinas semakin tinggi penghayatan orang tentang moral dunia militer dan semakin terserap pula mereka ke dalam dunia kemiliteran hingga kerelaan untuk mengorbankan diri untuk dunia kemiliteran (dalam ujud tindakan bunuh diri) pun menjadi lebih besar. Hal serupa juga terlihat dalam konteks perbedaan perwira-prajurit dan dalam kesukarelaan memasuki dunia kemiliteran. Untuk memperkuat temuan ini, Durkheim juga mencari bukti statistik lain – membandingkan angka bunuh diri di kalangan pasukan elite dan tentara biasa, dan di kalangan militer dan sipil. Keteraturan serupa pun diketemukannya – yang memperkuat pandangan Durkheim tentang gejala bunuh diri altruistik.

- (3) **Anomic suicide** – yaitu bunuh diri yang terjadi karena ketidak-jelasan norma-norma pengaturan cara berpikir, bertindak dan berperasaan individu. Menurut Durkheim, keadaan anomie ini terlihat baik dalam konteks ekonomis maupun domestik. Dalam konteks ekonomis, analisis statistik Durkheim memperlihatkan bahwa dalam keadaan krisis ekonomi orang jadi kehilangan arah sejalan dengan penurunan situasi sosial ekonomisnya: mereka harus mengurangi pengeluaran, membatasi kebutuhan, dan meningkatkan pengekangan diri.

Pertumbuhan kemakmuran yang mendadak dalam masyarakat juga punya akibat serta terhadap peningkatan angka bunuh diri dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertumbuhan secara mendadak ini membuat relevansi tatanan moral runtuh secara mendadak – sementara pembentukan tatanan moral yang baru tidak berjalan cepat untuk mengganti tatanan moral yang ada.

Dalam konteks kolektivitas domestik, hal serupa pun terlihat. Bagi Durkheim, keluarga punya signifikansi penting sebagai institusi yang menyanggah pola-pola normatif yang berlaku dalam masyarakat. Sejalan dengan hal ini,

lepasnya seseorang dari ikatan keluarga – baik karena tidak menikah atau karena sebab lain – membuat orang kehilangan pegangan untuk bertindak, berpikir, dan berperasaan. Karena itulah tingkat bunuh diri kalangan mereka yang tidak terikat lebih tinggi daripada mereka yang terikat dalam perkawinan dan kekeluargaan.

Ada empat jenis bunuh diri akibat dari tipe anomik ini, antara lain:

- a) **anomi ekonomis akut (*acute economic anomie*)** yakni kemerosotan secara sporadis pada kemampuan lembaga-lembaga tradisional (seperti agama dan sistem-sistem sosial pra-industrial) untuk meregulasikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
 - b) **anomi ekonomis kronis (*chronic economic anomie*)** adalah kemerosotan regulasi moral yang berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya saja Revolusi Industri yang menggerogoti aturan-aturan sosial tradisional. Tujuan-tujuan untuk meraih kekayaan dan milik pribadi ternyata tidak cukup untuk menyediakan perasaan bahagia. Saat itu angka bunuh diri lebih tinggi terjadi pada orang yang kaya daripada orang-orang yang miskin.
 - c) **anomi domestik akut (*acute domestic anomie*)** yang dapat dipahami sebagai perubahan yang sedemikian mendadak pada tingkatan mikrososial yang berakibat pada ketidakmampuan untuk melakukan adaptasi. Misalnya saja keadaan menjadi janda (*widowhood*) merupakan contoh terbaik dari kondisi anomie semacam ini.
 - d) **anomi domestik kronis (*chronic domestic anomie*)** dapat dilihat pada kasus pernikahan sebagai institusi atau lembaga yang mengatur keseimbangan antara sarana dan kebutuhan seksual dan perilaku di antara kaum lelaki dan perempuan. Seringkali yang terjadi adalah lembaga perkawinan secara tradisional sedemikian mengekang kehidupan kalangan perempuan sehingga membatasi peluang-peluang dan tujuan-tujuan hidup mereka.
- (4) **Fatalistic suicide.** bunuh diri ini terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat, sehingga menyebabkan individu ataupun kelompok tertekan oleh nilai dan norma tersebut. Durkheim menggambarkan seseorang

yang melakukan bunuh diri fatalistik seperti seseorang yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh nilai dan norma yang menindas.

Berdasarkan analisis tentang hubungan di antara tipe-tipe bunuh diri dan kesadaran kolektif seperti yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa bunuh diri itu merupakan gejala sosial, merupakan fakta sosial – dan bukan sekedar gejala individual.

Argumentasi yang digunakan Durkheim untuk memperkuat pandangan ini adalah: kasus-kasus bunuh diri tersebar dalam kolektivitas (seperti yang terungkap dari adanya tingkat bunuh diri). Dan sejalan dengan hal ini, argumentasi yang juga digunakan Durkheim untuk memperlihatkan bahwa bunuh diri merupakan gejala sosial dan bukannya gejala individual adalah: walau individu yang melakukan tindakan bunuh diri berbeda-beda dari satu kolektivitas ke kolektivitas lain, dan berbeda-beda dari satu masa ke masa yang lainnya (atau dengan kata lain, pelaku tindakan bunuh diri independen satu sama lain), data statistik memperlihatkan bahwa tingkat bunuh diri dalam kolektivitas cenderung stabil.

Yang jadi masalah apakah gejala bunuh diri ini merupakan hal yang normal dalam kolektivitas? Untuk menjawab soal ini, Durkheim berpandangan bahwa dilandaskan pada stabilitas tingkat bunuh diri, dapat dikatakan bahwa bunuh diri merupakan gejala yang normal dalam kolektivitas (suka atau tidak suka, dipandang individu sebagai pelanggaran moral atau tidak, bunuh diri terjadi). Bunuh diri sebagai gejala abnormal adalah jika tingkat kejadiannya berubah-ubah secara signifikan dalam jangka waktu tertentu

Namun demikian, meski Emile Durkheim pernah menganalisa sebab-sebab seseorang melakukan bunuh diri, namun penjelasan Durkheim tersebut tidak dapat menjelaskan fenomena bunuh diri dalam kasus teror bom seperti yang terjadi di Indonesia. Keempat tipe bunuh diri yang dijelaskan oleh Durkheim – *egoistic*, *altruistic*, *anomic*, dan *fatalistic* – tidak dapat menjelaskan tentang perilaku bunuh diri dalam kasus terorisme. Bahkan penjelasan tentang *altruistic suicide* pun tidak tepat untuk menjelaskan perilaku bunuh diri tersebut. *Altruistic suicide* adalah Bunuh diri akibat dari integrasi sosial yang terlalu kuat. Pengorbanan diri mampu mendefinisikan sikap dan perilaku individu yang sangat

menyatu dengan kelompok-kelompok sosial. Akhirnya mereka kehilangan pandangan terhadap keberadaan diri sendiri, sehingga mendorong mereka melakukan pengorbanan (*sacrifice*) demi kepentingan-kepentingan kelompoknya.

Meskipun jika dilihat sepintas memiliki kesamaan namun latar belakang alasan perilaku bunuh diri tersebut sangatlah berbeda. Dalam konteks Jihad yang diyakini oleh pelaku teroris, perilaku bunuh diri yang disebut sebagai *Istimata*, adalah merupakan sebuah pengabdian yang tidak terelakkan dan merupakan jalan pintas menuju surga. Dalam pemahaman yang dianut oleh teroris, membunuh orang kafir dengan jalan bunuh diri akan mendapat pengampunan dosa-dosanya dari Allah dan mendapatkan tempat di surga. Dengan janji surga dan kenikmatan yang akan diperoleh – tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi kerabatnya – setelah kematiannya, membuat seseorang akan sangat berani memutuskan untuk melakukan aksi bom bunuh diri (Golose; 2009: 51). Dengan demikian jelas sekali perbedaan antara *altruistic suicide* dengan *Istimata*, jika dalam *altruistic suicide* pelaku bunuh diri telah kehilangan eksistensi dirinya akibat terintegrasi pada kelompoknya terlalu kuat dan kemudian memilih mengorbankan dirinya untuk kelompoknya, maka dalam *Istimata* pelaku bom bunuh diri memiliki pilihan dalam melakukan bunuh diri dan mengharapkan mendapatkan imbalan atas perbuatannya tersebut.

2.2.3. Pertukaran Sosial Sebagai Pencetus Komitmen Untuk Bunuh Diri

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) dari Peter Blau melihat bahwa semua bentuk hubungan manusia dibentuk dengan menggunakan analisis biaya-manfaat subjektif dan perbandingan alternatif. Demikian pula alasan seseorang berafiliasi dengan suatu kelompok juga sangat dipengaruhi oleh pertukaran manfaat akibat keanggotaannya dalam kelompok tersebut..

Blau (1964), dengan teorinya menjelaskan bahwa Individu mengambil bagian dalam suatu hubungan berdasarkan suatu perasaan kemanfaatan lebih dari pada paksaan timbal balik. Dalam melakukan kegiatan partisipasinya, individu didasari oleh suatu perasaan imbalan balasan melalui keterlibatan mereka melalui pengejaran kepuasan dan kemanfaatan. Dengan demikian, mereka berupaya untuk

menerima sesuatu untuk keterlibatan mereka yang sepadan dengan kontribusi mereka melalui aktivitas mereka.

Peter Blau menyatakan bahwa Interaksi sosial mula-mula terjadi di dalam kelompok sosial. Individu tertarik pada satu kelompok tertentu karena merasa bahwa keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan jika bergabung dengan kelompok lain. Karena tertarik pada satu kelompok tertentu, mereka ingin diterima. Untuk dapat diterima, mereka harus menawarkan keuntungan kepada anggota kelompok yang lain. Penawaran keuntungan ini termasuk pemberian kesan kepada anggota kelompok lainnya dengan menunjukkan bahwa dengan bergabungnya dia maka anggota kelompok lainnya akan mendapatkan keuntungan. yang bergabung dengan orang baru akan mendapat keuntungan. Hubungan dengan anggota kelompok akan menjadi kuat karena pendatang baru mengesankan kelompok – ketika anggota menerima hadiah yang mereka harapkan.

Di tahap awal bergabung dengan kelompok, persaingan untuk mendapatkan penghargaan sosial di kalangan anggota kelompok sebenarnya berperan sebagai tes untuk menyaring anggota kelompok yang potensial. Orang yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi kelompoknya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menempati posisi yang lebih baik. Akhirnya, individu yang lebih besar kemampuannya memberi keuntungan bagi kelompoknya akan tampil sebagai pemimpin dan kelompok pun terdiferensiasi.

Begitu pula yang terjadi dalam kelompok teroris, seseorang bergabung dengan kelompok teroris berawal dari ketertarikannya dengan manfaat yang akan diperolehnya jika bergabung dengan kelompok tersebut, dalam konteks kelompok teroris daya tarik untuk bergabung dengan kelompok tersebut adalah peluangnya untuk terlibat dalam Jihad. Terkait dengan hal tersebut, besar kemungkinan dalam proses perekrutannya kelompok teroris menggunakan mekahnisme selektif dan internalisasi nilai optimal.

2.2.4. Teori Pilihan Rasional dan Tindakan Terorisme

Teori pilihan rasional dalam menjelaskan fenomena terorisme mengasumsikan bahwa tindakan teroris biasanya berasal dari pertimbangan-

pertimbangan rasional, perhitungan atau kalkulasi untung-rugi, serta kesadaran yang penuh. Keputusan-keputusan ini merupakan suatu strategi yang optimal untuk memenuhi tujuan sosial politik dari pelaku (Crenshaw, 1992; Sandler dan Lapan, 1988; Victoroff, 2005; Wilson, 2000). Dengan kata lain, menurut teori ini, terorisme tidak mungkin mewakili perilaku patologis atau tidak logis tetapi, merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam beberapa keadaan. Tentu saja, beberapa perilaku teroris, khususnya bom bunuh diri, tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan tujuan mereka (Sandler dan Arce, 2003).

Namun demikian, beberapa perilaku teroris tampaknya bertentangan dengan asumsi bahwa tindakan seperti itu merupakan upaya yang optimal untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial-politik. Crenshaw (2000), misalnya, mempertahankan tujuan teroris kadang-kadang tidak masuk akal. Tindakan mereka, karena itu, tidak akan memenuhi tujuan mereka, dan dengan demikian, tidak dapat dianggap sebagai upaya rasional untuk mengejar tujuan-tujuan (lihat juga Brannan, Esler dan Anders Strindberg, 2001). Tujuan teroris mungkin tidak nyata sebagai menjatuhkan pemerintah - tetapi hanya mungkin, misalnya, sesuai dengan perekrutan dukungan atau bantuan kepada anggota keluarga (misalnya, Azam, 2005; Brooks, 2002; Jain & Mukand, 2004).

Komplikasi lain adalah bahwa orang yang percaya bahwa terorisme bisa menang menyebabkan mereka jarang benar-benar terlibat dalam kegiatan teroris (lihat Schbley, 2000). Meskipun tidak secara langsung terkait dengan terorisme, contoh mencolok menyoroti bahwa orang sering menahan diri dari tindakan membunuh orang lain, terlepas dari manfaat rasional dari tindakan ini: Selama Perang Dunia II, satu perkiraan adalah bahwa 85% dari infanteri tidak menembakkan senjata mereka ketika diserang oleh musuh, meskipun ada manfaat dari tindakan rasional yang diyakininya (Grossman, 1995).

Beberapa kasus terorisme jelas berasal dari perilaku irasional. Theodore Kaczinski, dijuluki special terrorism bomber, yang mengirim sekitar 16 bom melalui surat dan bertanggung jawab untuk tiga korban jiwa dan banyak korban luka-luka, tampaknya ditimbulkan oleh skizofrenia paranoid, seperti yang

didiagnosa oleh seorang psikiater, yang ditunjuk oleh pengadilan (Victoroff, 2005).

Perubahan sepele dalam asumsi - pada manfaat yang dirasakan atau biaya dari beberapa perbuatan atau niat yang dirasakan masing-masing pihak - dapat secara signifikan mempengaruhi kemungkinan bahwa teroris akan melakukan tindakan. Karena parameter ini tidak dapat diperkirakan dengan presisi, prediksi teori pilihan rasional bisa sangat menyesatkan (Wieviorka, 1993).

Teori pilihan rasional tampaknya tidak mengakomodasi efek dari tindakan impulsif, pengalaman emosional, atau kognisi yang cacat pada perilaku individu. Perasaan yang sangat besar untuk melakukan balas dendam, ambisi, dan kepercayaan kepada pemimpin, dengan demikian, perilaku berbuat curang bisa saja muncul dari kekuatan proses rasional (Victoroff, 2005). Hanya kekuatan-kekuatan yang muncul sementara dan istimewa dapat menjelaskan mengapa beberapa individu yang hidup dalam kondisi yang sama pernah melakukan tindakan ini.

Akhirnya, menurut Post (1998), jika terorisme adalah strategis dan rasional, kelompok tersebut harus lebih mungkin untuk bubar setelah mereka mencapai kemenangan. Artinya, manfaat kegiatan teroris harus berkurang. Buktinya, bagaimanapun, menunjukkan bahwa teroris sering menyabot kesuksesan mereka sendiri, beberapa saat sebelum kesepakatan telah tercapai. Sebaliknya, mereka ingin mempertahankan kelompok - dan mempertahankan tujuan dan makna - untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kepemilikan serta kebutuhan mereka untuk terlibat dalam upaya yang berisiko. Kekerasan sering menghasut sehingga tidak memenuhi tujuan strategis tetapi untuk memenuhi kebutuhan lain di dalam diri para anggota.

2.2.5. Hipotesis Frustrasi-Agresi

Hipotesa ini didasarkan sebagian besar pada hipotesis relatif-kekurangan, seperti yang diusulkan oleh Ted Robert Gurr (1970), seorang ahli pada perilaku dan gerakan kekerasan, dan dirumuskan oleh JC Davies (1973) untuk menyertakan kesenjangan antara harapan yang meningkat dan kebutuhan akan kepuasan. Pendukung lain dari hipotesis ini, Yusuf Margolin (1977: 273-4),

berpendapat bahwa “perilaku teroris banyak merupakan respon terhadap frustrasi berbagai kebutuhan politik, ekonomi, dan pribadi”. Ada pula pakar lainnya yang justru menolak hipotesis frustrasi-agresi sebagai suatu hal yang sangat sederhana, “adalah asumsi yang salah bahwa agresi selalu merupakan konsekuensi dari frustrasi”.

Menurut Franco Ferracuti (1982), seorang Profesor sosiologi-kriminologi pada Universitas Roma, pendekatan yang lebih baik dari hipotesis ini, termasuk teori Marxis, akan menjadi teori subkultur, yang memperhitungkan bahwa teroris hidup di subkultur mereka sendiri, dengan sistem nilai mereka sendiri. Demikian pula, ilmuwan politik Paul Wilkinson (1974: 127) yang menyatakan bahwa kesalahan hipotesis frustrasi-agresi karena “sangat sedikit untuk mengatakan tentang psikologi sosial dari prasangka dan kebencian ...” dan terkandung fanatisisme bahwa “menjelaskan tindakan terorisme sebagai hanya semata-mata memainkan peran utama dalam mendorong kekerasan ekstrim”. Ia percaya bahwa “terorisme politik tidak bisa dipahami di luar konteks perkembangan teroris, seperti hal-hal yang berpotensi teroris, ideologi, keyakinan dan gaya hidup”.

2.2.6. Pembentukan Identitas

Menggunakan teori Erikson tentang pembentukan identitas, khususnya konsep tentang identitas negatif, Jeanne N. Knutson (1981) menunjukkan bahwa teroris politik secara sadar mengasumsikan identitas secara negatif. Salah satu contoh yang dia kemukakan adalah teroris adalah Kroasia, sebagai anggota etnis minoritas yang tertindas, kecewa oleh kegagalan aspirasi untuk mencapai pendidikan di tingkat universitas, dan sebagai hasilnya diasumsikan identitas negatif dengan menjadi seorang teroris. Dalam pandangan Knutson, teroris terlibat dalam terorisme sebagai akibat dari perasaan marah dan tidak berdaya karena tiadanya alternatif. Pandangan ini yang kemudian mengantarkan hipotesis frustrasi-agresi.

Dari banyak studi terlihat bukti bahwa individu yang menjadi teroris sering merupakan penduduk yang menganggur, tanpa pekerjaan tetap, individu yang terasing secara sosial dan “terjatuh-keluar” dari masyarakat. Manakala seorang individu untuk memilih menjadi seorang teroris, ia harus termotivasi

untuk melakukannya. Memiliki motivasi yang tepat, bagaimanapun, masih tidak cukup. Calon teroris perlu memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kelompok teroris. Dan seperti kebanyakan pencari kerja, ia harus diterima oleh kelompok teroris, yang merupakan kelompok yang sangat eksklusif. Dengan demikian, terekrut tidak hanya perlu memiliki kepribadian yang akan memungkinkan mereka untuk masuk ke kelompok, tetapi idealnya memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan oleh kelompok, atau paling tidak motivasi untuk loyal terhadap kelompok dan segala visi dan misinya (Jeanne N. Knutson, 1981).

Model jalur pribadi menunjukkan bahwa teroris berasal dari seorang yang dipilih, berasal dari populasi yang penuh risiko, yang menderita dari kerusakan dini untuk harga diri mereka. Sebagai anggota kelompok, mereka tampaknya telah gagal dalam mendapatkan tempat tradisional yang diinginkan dalam masyarakat, dan hal ini menambah frustrasi mereka. Kebutuhan yang mendasari mereka untuk menjadi bagian dari kelompok teroris merupakan gejala identitas psikososial, baik lengkap maupun terfragmentasi (dalam istilah Kohut's - "kelompok diri" cacat atau terfragmentasi). Menariknya, kegiatan sosial, kultural dan politik yang dikembangkan kemudian lebih memprovokasi kekerasan oleh individu-individu ini dan sering meningkatkan kondisi hubungan pribadi dengan teroris lain yang mengarah ke keanggotaan dalam kelompok kekerasan (target eksternal bersama?).

Banyak pengamat telah mencatat bahwa kepribadian teroris memiliki aspek depresi untuk hal-hal tersebut, sebagaimana tercermin dalam upaya pencarian kematian sebagai teroris mencari atau perilaku yang siap menghadapi kematian. Para teroris sering digambarkan oleh pakar sosiologi dan psikologi sebagai individu yang tidak mampu menikmati apa pun (*anhedonic*) atau membentuk hubungan interpersonal yang berarti pada tingkat timbal balik. Menurut Hamilton, L.C., dan J.D. Hamilton (1983), dunia interpersonal teroris ditandai oleh tiga kategori orang : pahlawan ideal para teroris itu sendiri; musuh teroris; dan orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari mereka temui di mana orang-orang tersebut tidak tahu persis siapa itu teroris dan jika tahu mereka hanya anggap tokoh bayangan sehingga tidak memiliki konsekuensi apa-apa terhadap kelompok teroris yang Namun, Rice (1982:123) mencatat bahwa beberapa

psikolog dengan pengalaman yang luas dengan beberapa teroris yang paling berbahaya, mengatakan bahwa “teroris mungkin akan sangat normal dari sudut pandang klinis, bahwa ia mungkin memiliki psikopatologi dari tatanan yang berbeda, atau bahwa kepribadiannya mungkin hanya faktor kecil terkait dengan kenyataan mereka menjadi teroris, jika ia direkrut ke dalam kelompok teroris maka lebih karena mereka memiliki sikap sukarela”.

2.2.7. Fanatisme

Pendekatan lain untuk memahami terorisme adalah pendekatan fanatisme, menjelaskan bahwa para teroris sebagai fanatik, menekankan kualitas rasional teroris dan memandang teroris sebagai individu, perencanaan logis yang “dingin”, yang sangat mengganggu penghargaan ideologi dan politik, bukan finansial. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa teroris sering berpendidikan dan memiliki kemampuan canggih, walaupun sangat bias, retorika dan sering bertindak sebagai analis politik.

Terlepas dari asal-usul kata yang terkait dengan agama, “fanatisme” dalam penggunaan modern, telah diperluas keluar dari konteks agama untuk merujuk kepada keyakinan umumnya yang dipertahankan secara lebih ekstrim. Terroris sering dicap sebagai fanatik, terutama dalam tindakan yang mengarah pada penghancuran diri. Meskipun fanatisme tidak unik untuk terorisme, dalam istilah psikologi sosial, konsep fanatisme membawa beberapa implikasi dari penyakit mental. Namun, Taylor (1988:97) menunjukkan, itu “bukan sebuah kategori diagnostik pada penyakit mental.” Dengan demikian, ia percaya bahwa “walau umumnya diadakan asumsi tentang hubungan antara fanatisme dan penyakit mental ... tampaknya tidak pantas. “Para fanatik sering tampak untuk melihat dunia dari perspektif tertentu berbaring di ekstrim kontinum”.

Taylor, lebih lanjut, menunjukkan bahwa antara prasangka dan otoritarianisme, jika dihubungkan dengan yang fanatisme, memiliki sejumlah proses kognitif yang sama, seperti keengganan untuk berkompromi, suatu penghinaan bagi pandangan-pandangan alternatif lain, kecenderungan untuk melihat hal-hal dalam hitam-putih, sebuah kekakuan keyakinan, dan persepsi dunia yang mencerminkan pikiran yang tertutup. Memahami sifat fanatisme,

menurutnya, akan membutuhkan pengakuan terhadap peran konteks budaya (agama dan sosial). Fanatisme, dalam pandangan Taylor, "... menjadi bagian dari *cluster atribut* dari teroris." Namun, Taylor menekankan bahwa konteks budaya tertentu di mana teroris beroperasi perlu dipertimbangkan dalam memahami apakah istilah ini mungkin cocok.

2.2.8. Dinamika Kelompok Teroris

Tidak dapat mempelajari dinamika kelompok teroris dari tangan pertama, ilmuwan sosial kemudian telah menerapkan pemahaman mereka tentang perilaku kelompok- kecil untuk kelompok teroris. Beberapa fitur dari kelompok teroris, seperti tekanan terhadap kesesuaian dan konsensus, merupakan karakteristik dari semua kelompok-kelompok kecil. Untuk apapun alasan individu berperan sebagai teroris, transformasi mereka menjadi teroris dengan agenda politik atau agama mengambil tempat dalam struktur kelompok teroris. Kelompok ini memberikan rasa memiliki, rasa diri penting, dan sistem kepercayaan baru yang mendefinisikan aksi teroris secara moral dapat diterima dan tujuan kelompok sebagai sangat penting. Seperti Shaw (1988:366) jelaskan: "ternyata keanggotaan dalam kelompok teroris sering memberikan solusi untuk kebutuhan pribadi yang mendesak ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat tradisional". Identitas teroris menawarkan peran individu dalam masyarakat, meskipun yang negatif, yang sepadan dengan harapan sebelumnya dan memadai untuk mengkompensasi kerugian masa lalu. Keanggotaan kelompok memberikan harapa bagi potensi memperoleh lingkungan interpersonal yang intens dan dekat, status sosial, akses potensi untuk kekayaan bathin dan kebahagiaan bagi kehidupan masa depan setelah kematian serta berbagi dalam desain sosial megah tapi mulia. Kekuatan sosial-psikologis yang kuat menjadi bahan konversi dalam kelompok yang patut diperhitungkan untuk mengimbangi sanksi sosial tradisional terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Untuk para teroris tindakan mereka mungkin memiliki status moral perang agama atau pembebasan politik serta menjangkau surga setelah kematian yang dilakukan secara ikhlas terkait dengan loyalitas terhadap kelompok dan perjuangan kelompok teroris tersebut.

Kelompok teroris mirip dengan sekte keagamaan. Mereka membutuhkan komitmen total oleh anggota, mereka sering melarang hubungan dengan pihak luar, meskipun ini mungkin tidak terjadi dengan kelompok teroris etnis atau separatis yang anggotanya terintegrasi dengan baik ke masyarakat, mereka mengatur dan kadang-kadang melarang hubungan seksual, mereka mencari kekompakan melalui kepercayaan dan saling ketergantungan, dan mereka berusaha untuk mencuci otak anggota individu dengan ideologi tertentu mereka. Menurut Harry C. Holloway, MD, dan Ann E. Norwood, MD (1997:417), proses bergabung untuk mengambil pada keyakinan, kode, dan kultur kelompok teroris “melibatkan interaksi antara struktur psikologis dari kepribadian teroris dan faktor-faktor ideologis, proses kelompok, struktur organisasi kelompok teroris dan lingkungan sosial budaya kelompok.”

Sebagai upaya memperdalam radikalisisasi, identitas kelompok kolektif mengambil alih banyak identitas individual dari anggota, dan, pada tahap akhir, identitas kelompok teroris mencapai puncaknya “menjadi identitas kelompok ini sangat penting seperti apa yang Post (1990:38) jelaskan.: “Terroris tidak dapat dipaksa untuk menyerah, karena untuk melakukannya akan kehilangan alasan mereka untuk menjadi teroris itu sendiri” Ditambahkan oleh Post (1990: 39) kelompok teroris menampilkan karakteristik *groupthink*, seperti yang dijelaskan oleh Janis (1972), bahwa di antara karakteristik yang ada, Janis *groupthink* adalah kekebalan ilusi yang mengarah ke optimisme yang berlebihan dan pengambilan risiko yang berlebihan, praduga moralitas kelompok, persepsi musuh sebagai jahat, dan toleransi oleh anggota kelompok untuk berbagi keyakinan kunci.

Beberapa prinsip penting dari dinamika kelompok antara kelompok-kelompok yang beroperasi secara legal juga dapat berguna diterapkan pada analisis dinamika kelompok teroris. Salah satu prinsip yang berlaku umum, seperti yang ditunjukkan oleh W. Bion (1961), adalah bahwa penilaian dan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat dari dinamika kelompok. Setiap kelompok, menurut Bion, memiliki dua kekuatan yang berlawanan - kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang langka, sepenuhnya kooperatif terhadap tujuan yang telah diarahkan, konflik-bebas untuk mencapai tujuan lain, dan kecenderungan kuat untuk menyabot tujuan lain. Hasil Kecenderungan

terakhir dalam kelompok yang mendefinisikan dirinya dalam kaitannya dengan dunia luar dan bertindak seolah-olah satu-satunya cara untuk bisa bertahan adalah dengan berperang melawan atau melarikan diri dari musuh, sebuah kelompok yang mencari arah ke pemimpin mahakuasa, kepada siapa bawahan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri; dan menganggap kelompoknya bertindak untuk menyelamatkan mereka dan menciptakan dunia yang lebih baik. Post berpendapat bahwa kelompok teroris adalah pendewaan dari kecenderungan sabotase, yang secara teratur menunjukkan ketiga gejala tersebut.

2.2.9. Tekanan untuk Konformis

Tekanan rekan, solidaritas kelompok, dan psikologi dinamika kelompok membantu tekanan anggota individu untuk tetap berada di kelompok teroris. Menurut Post (1986), teroris cenderung menenggelamkan identitas mereka sendiri ke dalam kelompok, menghasilkan semacam “pikiran kelompok” dan kode moral kelompok yang tidak diragukan lagi serta pada gilirannya membutuhkan ketaatan kepada kelompok. Seperti Crenshaw (1985) telah amati, “Kelompok ini, sebagai pemilih dan penafsir ideologi, adalah secara konsisten meningkatkan kohesi kelompok atau menurunkan ketergantungan di luar kelompok.

Kebutuhan untuk memiliki kelompok adalah hal yang paling memotivasi pengikut untuk bergabung dengan kelompok teroris. Perilaku antara teroris sama, dalam analisis Post (1986), karena kebutuhan ini individu akan terasing dari kepemilikan diri. Untuk merekrut anggota baru, kelompok teroris menjadi keluarga pengganti, dan para pemimpin kelompok menjadi orang tua pengganti. Sebuah konsekuensi tersirat dari observasi Post (1986) bahwa motivasi kunci untuk keanggotaan dalam kelompok teroris adalah rasa memiliki dan persaudaraan dari individu-dan selalu berpikiran khawatir yang cukup besar di antara anggota kelompok bahwa kelompoknya bisa dibubarkan. Sebagai kelompok yang datang di bawah serangan dari aparat keamanan, kecenderungan akan terjadi bagi kelompok untuk menjadi lebih kohesif.

2.2.10. Rasionalisasi Kekerasan

Hidup “bawah tanah” menyebabkan teroris secara bertahap menjadi terlepas dari realitas, terlibat dalam apa yang Ferracuti (1982) telah gambarkan

sebagai “perang fantasi.” Tegangan yang menyertai kehidupan “bawah tanah” mereka, kehidupan rahasia sebagai teroris mungkin juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang merugikan bagi mereka. Jadi, ketika Taylor (1988:93) menunjukkan, meskipun “penyakit mental tidak mungkin menjadi cara yang sangat membantu konseptualisasi terorisme, tindak terorisme dan keanggotaan dalam organisasi teroris mungkin memiliki implikasi untuk kesehatan mental teroris.”

Albert Bandura (1990) menggambarkan empat teknik dari pelepasan moral yang dapat digunakan kelompok teroris untuk melindungi diri dari konsekuensi tindakannya Pertama, dengan menggunakan justifikasi moral teroris yang dapat membayangkan diri mereka sebagai penyelamat konstituen mereka yang terancam oleh kejahatan besar. Sebagai contoh, Donatella della Porta (1992:286), yang mewawancarai anggota kelompok militan sayap kiri di Italia dan Jerman, mengamati bahwa para militan “mulai menganggap diri mereka sebagai anggota komunitas heroik dan orang dermawan berperang melawan ‘kejahatan’”.

Kedua, melalui teknik perpindahan tanggung jawab ke pemimpin atau anggota lain dari kelompok. Teroris memerankan diri sebagai fungsionaris yang hanya mengikuti perintah pemimpin mereka. Sebaliknya, teroris mungkin menyalahkan anggota lain dari kelompok. Kelompok yang terorganisir mungkin lebih mampu melaksanakan operasi kejam karena potensi perpindahan tanggung jawab. Della Porta melakukan wawancara dengan militan sayap kiri menunjukkan bahwa kelompok yang lebih terkotak adalah semakin mulai kehilangan kontak dengan kenyataan, termasuk dampak yang sebenarnya dari tindakan sendiri. Manifestasi lain dari teknik ini adalah termasuk perpindahan tuduhan yang dibuat oleh Asahara, pemimpin Aum Shinrikyo, bahwa Central Intelligence Agency (CIA) menggunakan bahan kimia terhadap dia dan penduduk Jepang.

Teknik ketiga adalah untuk meminimalkan atau mengabaikan penderitaan aktual dari korban. Seperti Bonnie Cordes (1987) tunjukkan, teroris mampu melindungi diri dari kecemasan moral yang dipicu oleh hasil serangan mereka *hit and run*, seperti penggunaan bom waktu. Namun demikian, ia mencatat bahwa “Debat atas pembenaran kekerasan, jenis target, dan isu pembunuhan tanpa

pandang bulu versus pandangan yang membedakan aspek-aspek tersebut adalah endemik untuk kelompok teroris. “Seringkali perdebatan ini menyebabkan perpecahan internal dalam kelompok teroris”.

Memperluas pada rasionalisasi rasa bersalah, D. Guttman (1979:525) berpendapat bahwa “teroris menegaskan bahwa ia hanya mencintai kualitas sosial sebagai penebusan tindakan membunuh, bukan tindakan itu sendiri.” Dengan logika ini, nurani para teroris berbalik melawan orang-orang yang menentang cara-cara kekerasan, bukan melawan dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam analisis Guttman, para teroris telah memproyeksikan kesalahannya ke luar. Dalam rangka untuk membebaskan kesalahannya sendiri, teroris harus mengklaim bahwa dalam keadaan ia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang harus ia lakukan. Meskipun pilihan lain sebenarnya terbuka untuk teroris, Guttman percaya bahwa banyak orang menjadi ikut melegitimasi teroris dengan menerima rasionalisasi pembunuhan ini.

2.2.11. Persepsi Ideologi atau Agama

Teroris tidak melihat dunia sebagai apa anggota pemerintah atau masyarakat sipil lakukan. Sistem kepercayaan mereka membantu untuk menentukan strategi mereka dan bagaimana mereka bereaksi terhadap kebijakan pemerintah. Seperti Martha Crenshaw (1988:12) telah amati, “Tindakan organisasi teroris didasarkan pada interpretasi subyektif dari dunia daripada realitas objektif.” Variabel dari sistem kepercayaan mereka yang terbentuk termasuk lingkungan politik dan sosial, tradisi budaya, dan dinamika internal dari kelompok adalah pedoman mereka dalam melakukan tindakan. Keyakinan mereka mungkin tampak tidak rasional atau delusional bagi masyarakat pada umumnya, tetapi teroris tetap bisa bertindak rasional dalam komitmen mereka untuk bertindak atas keyakinan mereka.

Menurut teori kognitif, aktivitas mental individu (persepsi, memori, dan penalaran) adalah faktor penentu penting dari perilaku. Kognisi merupakan konsep penting dalam psikologi, karena itu adalah proses umum oleh individu yang datang untuk mengetahui dan memahami dunia. Teroris memandang dunia dalam lensa sempit ideologi mereka sendiri, apakah itu Marxisme-Leninisme, anarkisme,

nasionalisme, fundamentalisme Islam, atau ideologi lain. Kebanyakan peneliti setuju bahwa teroris umumnya tidak menganggap diri mereka sebagai teroris tetapi lebih sebagai tentara, pembebas, martir, dan pejuang yang sah untuk sebab-sebab sosial yang mulia. Para teroris yang menyadari bahwa tindakan mereka adalah sangat berkomitmen yang menyebabkan bahwa mereka mereka tidak benar-benar peduli bagaimana mereka dilihat di dunia luar.

Ada karya yang berusaha menjelaskan fundamentalisme agama, sering mengandalkan teori modernisasi dan menunjukkan krisis identitas, menjelaskan fundamentalisme agama sebagai penangkal dislokasi akibat perubahan yang cepat, atau modernisasi. Fundamentalisme Islam secara khusus sering dijelaskan sebagai pertahanan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh modernisasi untuk identitas tradisional sebuah kelompok keagamaan itu. Menolak gagasan fundamentalisme sebagai patologi, ahli teori pilihan rasional mengarah ke pembangunan sosial ekonomi yang tidak setara sebagai alasan dasar untuk ketidakpuasan dan keterasingan dari pengalaman individu. Terperangkap antara budaya Islam yang memberikan nilai-nilai moral dan kepuasan spiritual dan budaya Barat modern yang menyediakan akses ke perbaikan materi, banyak orang Muslim menemukan jawaban untuk menghasilkan kecemasan, keterasingan, dan disorientasi melalui dedikasi mutlak untuk sebuah cara hidup Islam. Oleh karena itu, fundamentalis Islam umumnya digambarkan sebagai seorang individu akut terasing, dengan keyakinan dogmatis dan kaku dan kompleks rendah diri, dan sebagai idealis dan bertaqwa terhadap gaya hidup keras penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.